

**KOMUNIKASI POLITIK KEPALA DESA DENGAN BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA DALAM
MENCEGAH KONFLIK SOSIAL
(Studi Pekon Sukaraja, Kecamatan Semaka,
Kabupaten Tanggamus)**

(Skripsi)

Oleh

Maryani

NPM 1716021002



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2021**

ABSTRAK

KOMUNIKASI POLITIK KEPALA DESA DENGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM MENCEGAH KONFLIK SOSIAL (Studi Pekon Sukaraja, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus)

Oleh

MARYANI

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh warga Pekon Sukaraja serta adanya kesalahpahaman. Penelitian ini bertujuan untuk membahas mengenai komunikasi politik kepala desa dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam mencegah konflik sosial di Pekon Sukaraja, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus serta membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pencegahan konflik sosial di Pekon Sukaraja, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus dengan menggunakan paradigma Harold Lasswell. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan komunikasi politik kepala desa dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam mencegah konflik sosial menggunakan komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal kepala desa dalam mencegah konflik sosial menggunakan model komunikasi interaksional dan model komunikasi transaksional dengan gaya komunikasi *the equalitarian style* dan *the controlling style*. Sedangkan komunikasi interpersonal Badan Permusyawaratan Desa menggunakan model komunikasi interaksional dengan gaya komunikasi *the equalitarian style*. Bentuk-bentuk komunikasi kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa berupa percakapan, dialog dan *sharing*. Faktor yang mempengaruhi dalam pencegahan konflik sosial di Pekon Sukaraja, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus yaitu faktor pendukung berupa penguasaan bahasa, sarana komunikasi, kemampuan berpikir, lingkungan yang baik dan faktor penghambat berupa hambatan psikologis dan hambatan media.

Kata kunci : konflik sosial, komunikasi politik, pemerintah desa

ABSTRACT

POLITICAL COMMUNICATION OF THE VILLAGE CHIEF AND THE VILLAGE CONSULTANCY AGENCY IN PREVENTING SOCIAL CONFLICT

(Study of Sukaraja Village, Semaka District, Tanggamus Regency)

By

MARYANI

This research is motivated by the existence of vigilante actions carried out by the residents of Sukaraja Village and the existence of misunderstandings. This study aims to discuss the political communication of the village chief and the Village Consultative Body in their role to prevent social conflict in Sukaraja Village, Semaka District, Tanggamus Regency and discuss influencing factors to prevent social conflict in Sukaraja Village, Semaka District, Tanggamus Regency using the Harold Lasswell paradigm. This study uses a descriptive method with a qualitative approach. The results showed that the village chief used interpersonal communication in his political communication with the Village Consultative Body to prevent social conflict. The interpersonal communication of the village head preventing social conflict uses an interactional communication model and a transactional communication model with the equalitarian style and the controlling style. Meanwhile, the interpersonal communication of the Village Consultative Body uses an interactional communication model with the equalitarian style of communication. The form of communication between the village head and the Village Consultative Body are in the form of conversation, dialogue and sharing. Influencing factors found in preventing social conflict in Sukaraja Village, Semaka District, Tanggamus Regency, namely supporting factors in the form of mastery of language, means of communication, thinking skills, good environment and the inhibiting factors found are psychological barriers and media barriers.

Keywords: social conflict, political communication, village government

**KOMUNIKASI POLITIK KEPALA DESA DENGAN BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA DALAM
MENCEGAH KONFLIK SOSIAL
(Studi Pekon Sukaraja, Kecamatan Semaka,
Kabupaten Tanggamus)**

Oleh

Maryani

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA ILMU PEMERINTAHAN

Pada

Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2021**

Judul Skripsi : **KOMUNIKASI POLITIK KEPALA DESA DENGAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM
MENCEGAH KONFLIK SOSIAL
(Studi Pekon Sukaraja, Kecamatan Semaka,
Kabupaten Tanggamus)**

Nama Mahasiswa : **Maryani**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1716021002**

Program Studi : **Ilmu Pemerintahan**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**




Hertanto, M.Si., Ph.D.
NIP. 19601010 198603 1 006


Himawan Indrajat, S.IP., M.Si.
NIP. 19830727 200912 1 009

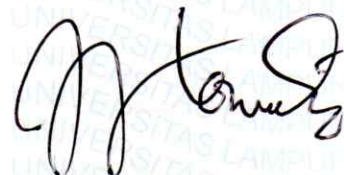
2. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan


Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP.
NIP. 19611218 198902 1 001

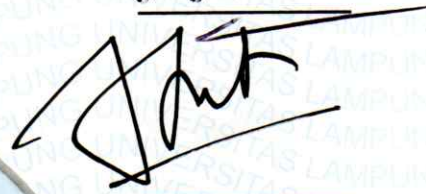
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

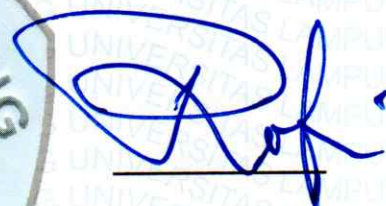
Ketua : Hertanto, M.Si., Ph.D.



Sekretaris : Himawan Indrajat, S.IP., M.Si.



Penguji : Dr. Robi Cahyadi Kurniawan, MA.



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dra. Ida Nurhaida, M.Si.

NIP. 19610807 198703 2 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 17 September 2021

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun diperguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 17 September 2021
Yang Membuat Pernyataan



Maryani
NPM. 1716021002

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Maryani, anak pertama dari 2 (dua) bersaudara. Dilahirkan di Pringsewu, Lampung pada tanggal 4 Juni 1998 dari pasangan Bapak Dayat dan Ibu Boniyem. Jenjang pendidikan penulis dimulai dari tingkat sekolah dasar yaitu SD Negeri 1 Srikaton, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus pada tahun 2005 dan lulus pada tahun 2011. Pendidikan tingkat sekolah menengah pertama penulis selesaikan di SMP Negeri 1 Semaka, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus pada tahun 2011 dan lulus pada tahun 2014. Pendidikan sekolah menengah atas penulis selesaikan di SMA Negeri 1 Kotaagung, Kabupaten Tanggamus pada tahun 2014 dan lulus pada tahun 2017.

Tahun 2017 penulis dinyatakan lulus pada Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) dan dinyatakan diterima sebagai mahasiswa pada Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung, penulis juga merupakan mahasiswa penerima beasiswa Bidikmisi. Selama kuliah di Jurusan Ilmu Pemerintahan, penulis mengikuti kegiatan demi menunjang kapasitas dan kualitas diri. Penulis aktif di BEM U KBM Universitas Lampung sebagai staff ahli Sosial Masyarakat pada tahun 2018-2019. Selain di internal kampus penulis juga menjalani aktivitas organisasi di lembaga eksternal kampus. Penulis diberi amanah menjadi sekretaris bidang Sumber Daya Manusia (SDM) Global Youth Indonesia pada tahun 2019. Demikian sekelumit aktivitas penulis di masa kuliah sejak rentang waktu 2017-2021.

MOTTO

Sungguh, janji Allah itu benar, maka janganlah kehidupan dunia memberdayakan kamu dan janganlah (setan) yang pandai menipu, memberdayakan kamu tentang Allah

(Q.S Fatir ayat 5)

Jangan tuntutan Tuhanmu karena tertundanya keinginanmu, tetapi tuntutan dirimu karena menunda adabmu kepada Allah

(Ibnu Atha'illah As-Sakandari)

Tidak ada hal yang sia-sia dalam belajar karena ilmu akan bermanfaat pada waktunya

(Maryani)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil'alamiin telah Engkau Ridhai Ya Allah segala ikhtiar hamba-Mu sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan.

Shalawat teriring salam, selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, yang selalu dinantikan syafa'atnya di Yaumul Akhir

dan

Ku persembahkan karya sederhana ini kepada sosok luar biasa

Ibu dan Bapak tercinta
Boniyem dan Dayat

Saudari tersayang
Maryana S.A.B

Terimakasih untuk semua yang mendoakan dan mendukung selesainya skripsi ini, semoga segala kebaikan mendapat balasan dari Allah SWT

Almamater Tercinta Universitas Lampung

SANWACANA

Segala puji bagi Allah SWT atas nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Komunikasi Politik Kepala Desa Dengan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Mencegah Konflik Sosial (Studi Pekon Sukaraja, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus). Sholawat teriring salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, sungguh gerakan revolusioner yang telah tergores dalam sejarah memberikan inspirasi dan teladan yang begitu luar biasa bagi umat manusia dan peradabannya.

Skripsi ini merupakan karya ilmiah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung. Penulis menyadari akan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan dalam penyusunan skripsi ini. Tanpa bantuan dari berbagai pihak, skripsi ini mustahil dapat terwujud dengan baik. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini antara lain yaitu:

1. Bapak Prof. Dr. Karomani, M.Si selaku Rektor Universitas Lampung
2. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung.
3. Bapak Drs. Sigit Krisbintoro, M.IP selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung.
4. Bapak Dr. Syarief Makhya, M.Si selaku dosen Pembimbing Akademik peneliti.
5. Bapak Hertanto, M.Si., Ph.D selaku pembimbing utama penulis yang telah banyak memberikan kritik, saran, masukan dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan sebaik-baiknya.
6. Bapak Himawan Indrajat, S.IP.,M.Si selaku pembimbing kedua penulis. Terimakasih atas segala bimbingannya sehingga peneliti mampu menyelesaikan sampai tahap akhir skripsi.
7. Bapak Dr. Robi Cahyadi Kurniawan, M.A selaku dosen penguji, terimakasih telah memberikan kritik, saran dan masukan yang sangat luar biasa dan sangat membantu penulis dalam pengerjaan skripsi ini.
8. Seluruh dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat penulis kepada bapak/ibu semua. Terimakasih telah memberikan ilmu dan

pengalamannya. Terimakasih telah menjadi seseorang yang berpengaruh bagi penulis untuk merengguh ilmu pengetahuan.

9. Seluruh perangkat desa dan warga Pekon Sukaraja, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus yang telah bersedia menjadi informan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.
10. Terimakasih untuk kedua orang tua tercinta, Bapak Dayat dan Ibu Boniyem yang selalu mendoakan anaknya (penulis) dalam menyelesaikan perkuliahan dan skripsi ini. Terimakasih telah berjuang untuk menjadikan penulis sebagai insan berpendidikan tinggi. Semoga ilmu yang penulis dapatkan dapat bermanfaat bagi banyak orang dalam menjadi amal jariyah yang akan selalu mengalir kepada Bapak dan Ibu tercinta.
11. Saudari tersayang Maryana S.A.B yang telah membantu penulis dalam pengerjaan skripsi dan memberikan penulis motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
12. Keluarga besar dari Bapak Dayat di Lampung Barat, kakek, nenek, paman, bibi, sepupu dan ponakan. Terimakasih sudah memberikan do'a, motivasi dan nasehat untuk menyelesaikan perkuliahan dan skripsi ini.
13. Keluarga besar dari mamak Boniyem, Mbokde, Pakde, Kakang, Mbak, Sepupu dan Ponakan. Terimakasih sudah memberikan do'a, motivasi dan nasehat untuk menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih juga untuk ponakan Ferly Kintono yang pernah menemani penulis melakukan observasi penelitian dan terimakasih untuk sepupu Yunus Oki Setiawan yang telah membantu penulis jika ada tugas perkuliahan observasi lapangan.
14. Seluruh keluarga penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan doa kepada penulis untuk menyelesaikan proses perkuliahan dengan lancar.
15. Teman-teman Jurusan Ilmu Pemerintahan angkatan 2017 Reguler A, B dan Paralel yang telah memberikan momen indah selama masa perkuliahan.
16. Sahabat penulis Ema Elviana, Nuraisyah, Silvia Wulandary, Yasri Lestari, Achitia Lindi Saputri, Seli Yulia Ningsih serta teman seperjuangan penulis Fitri Windasari yang telah banyak membantu penulis dalam proses perkuliahan dan pengerjaan skripsi ini. Terimakasih atas doa, motivasinya. Semoga kita semua selalu diberikan kemudahan dan kelancaran untuk kedepannya.
17. Terimakasih untuk semua yang menyayangi dan mendoakan penulis.

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR SINGKATAN	vi

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang dan Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	11
1.3 Tujuan Penelitian.....	12
1.4 Manfaat Penelitian.....	12

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Tentang Komunikasi Politik	13
2.1.1 Pengertian Komunikasi Politik.....	13
2.1.2 Model Komunikasi Interpersonal	14
2.1.3 Gaya Komunikasi Politik	15
2.2 Tinjauan Tentang Konflik	16
2.2.1 Pengertian Konflik.....	16
2.2.2 Karakteristik Konflik.....	17
2.2.3 Macam-Macam Konflik	20
2.2.4 Ciri-Ciri dan Tahapan Terjadinya Konflik.....	20
2.2.5 Manajemen Konflik.....	21
2.2.6 Teori Komunikasi Harold Lasswell.....	23
2.3 Kerangka Pikir.....	24

III. METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian.....	27
3.2 Lokasi Penelitian	28
3.3 Fokus Penelitian	28
3.4 Informan Penelitian	29
3.5 Jenis Data	31
3.6 Teknik Pengumpulan Data	32
3.7 Teknik Pengolahan Data	37
3.8 Teknik Analisis Data.....	37
3.9 Teknik Validasi Data.....	40

IV. GAMBARAN UMUM

4.1 Gambaran Umum Lokasi Pekon Sukaraja, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus	41
4.1.1 Sejarah Pekon Sukaraja	41
4.1.2 Kondisi Geografis Pekon Sukaraja	41
4.1.3 Visi dan Misi Pekon Sukaraja	43
4.1.4 Kondisi Demografi Pekon Sukaraja	44
4.2 Kepala Desa	47
4.3 Badan Permusyawaratan Desa	50

V. HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Hasil Penelitian	52
5.1.1 Komunikasi politik kepala desa tahun 2009-2016 dalam mencegah konflik sosial di Pekon Sukaraja Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus	53
5.1.1.1 Konflik sosial di Pekon Sukaraja pada tahun 2013	53
5.1.1.2 Model komunikasi politik kepala desa periode 2009-2016	55
5.1.1.3 Gaya komunikasi politik kepala desa periode 2009-2016	57
5.1.2 Komunikasi politik kepala desa tahun 2016-2021 dalam mencegah konflik sosial di Pekon Sukaraja, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus	58
5.1.2.1 Konflik politik di Pekon Sukaraja tahun 2016	58
5.1.2.2 Model komunikasi politik kepala desa periode 2016-2021	62
5.1.2.3 Gaya komunikasi politik kepala desa periode 2016-2021	66
5.1.3 Komunikasi politik Badan Permusyawaratan Desa dalam mencegah konflik sosial di Pekon Sukaraja, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus	69
5.1.3.1 Model komunikasi politik Badan Permusyawaratan Desa	69
5.1.3.2 Gaya komunikasi politik Badan Permusyawaratan Desa	71
5.1.4 Bentuk-bentuk komunikasi politik kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa	72
5.1.4.1 Bentuk komunikasi politik formal kepala Pekon Sukaraja dan Badan Permusyawaratan Desa	72
5.1.4.2 Bentuk komunikasi politik informal (tidak formal) kepala Pekon Sukaraja dan Badan Permusyawaratan Desa	77
5.1.5 Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pencegahan konflik sosial di Pekon Sukaraja, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus	81
5.1.5.1 Faktor-faktor pendukung	81
5.1.5.2 Faktor-faktor penghambat	85
5.2 Pembahasan	87
5.2.1 Komunikasi politik kepala desa dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam mencegah konflik sosial di Pekon Sukaraja, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus	87
5.2.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pencegahan konflik sosial di Pekon Sukaraja, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus	91

5.2.3 Perkembangan sosial masyarakatPekon Sukaraja selama periode 2016-2021	94
--	----

VI. SIMPULAN DAN SARAN

6.1 Simpulan	98
6.2 Saran	99

DAFTAR PUSTAKA	100
-----------------------------	------------

LAMPIRAN.....	106
----------------------	------------

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Banyaknya konflik di Desa/Kelurahan yang terjadi selama tahun 2018	6
2. Penelitian Terdahulu	10
3. Data informan dalam penelitian	30
4. Waktu pelaksanaan wawancara.....	36
5. Jumlah Penduduk	44
6. Jumlah Prasarana Kesehatan	45
7. Pola Konsumsi Masyarakat Pekon Sukaraja.....	46
8. Komunikasi Kepala Desa Kepala Desa (2009-2016) dengan (2016-2021).....	69
9. Data Perangkat Pekon Sukaraja	140

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Jumlah konflik yang dilaporkan menurut kepolisian tahun 2019	2
2. Tingkat resiko terkena kejahatan menurut kepolisian tahun 2019.....	3
3. Kerangka Pikir	26
4. Peta Pekon Sukaraja, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus	42
5. Model Harold Lasswell.....	87
6. Wawancara kepada Boimin selaku Kepala Pekon Sukaraja.....	133
7. Wawancara kepada Ma'it selaku ketua Badan Permusyawaratan Desa	133
8. Wawancara kepada Hermansyah selaku perangkat desa	134
9. Wawancara kepada Sawirudin selaku tokoh adat Pekon Sukaraja	134
10. Wawancara kepada Suryati selaku warga Pekon Sukaraja	135
11. Wawancara kepada Mislan selaku warga Pekon Sukaraja	135
12. Wawancara kepada Mesinah selaku warga Pekon Sukaraja.....	135
13. Wawancara kepada Harni selaku warga Pekon Sukaraja	136
14. Wawancara kepada Hasanah selaku warga Pekon Sukaraja.....	136
15. Wawancara kepada Johan selaku warga kepala Pekon Sukaraja tahun 2009- 2016.....	136
16. Pasca konflik sosial di Pekon Sukaraja, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung.....	137
17. Tugu perdamaian pasca resolusi konflik di Pekon Sukaraja, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus.....	137
18. Kerusakan konflik gajah sumatera dengan warga Pekon Sukaraja.....	138
19. Struktur organisasi pemerintah Pekon Sukaraja.....	139

DAFTAR SINGKATAN

BPD	: Badan Permusyawaratan Desa
BHP	: Badan HIPPUN Pemekonan
TNI	: Tentara Nasional Indonesia
KK	: Kepala Keluarga
Puskesmas	: Pusat Kesehatan Masyarakat
Posyandu	: Pos Pelayanan Terpadu
SMP	: Sekolah Menengah Pertama
SD	: Sekolah Dasar
TK	: Taman Kanak-kanak
TNBBS	: Taman Nasional Bukit Barisan Selatan
APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Permendagri	: Peraturan Menteri Dalam Negeri
SARA	: Suku, Agama, Ras, antar golongan
Polsek	: Kepolisian Sektor

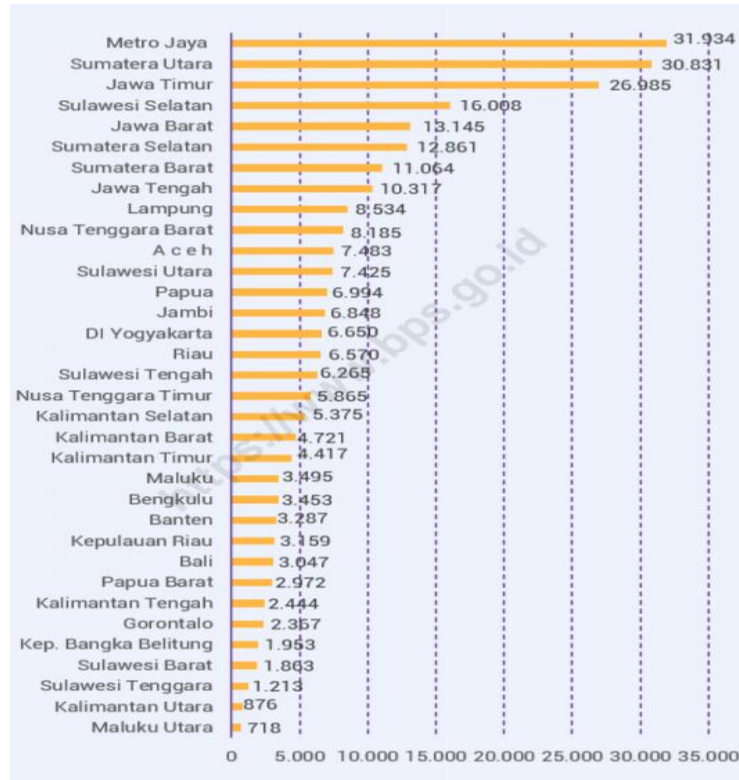
I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang dan Masalah

Indonesia merupakan negara kepulauan yang merdeka dan berdaulat yang terletak di kawasan Asia Tenggara. Secara astronomis Indonesia terletak di $6^{\circ}\text{LU}-11^{\circ}\text{LS}$ dan $95^{\circ}\text{BT}-141^{\circ}\text{BT}$ (Akbar, 2019:1). Indonesia merupakan negara yang memiliki ragam etnis yang merangkum ragam budaya, suku, agama dan adat istiadat (Tajuddin *et al.*, 2016:63). Keragaman budaya Indonesia merupakan kekayaan bangsa yang sangat berharga, namun disisi lain berpotensi menimbulkan konflik. Konflik yang sering muncul akibat keberagaman tersebut adalah konflik suku, agama, ras dan antar kelompok. Penyebab konflik lebih banyak disebabkan oleh ketimpangan ekonomi, ketidakadilan sosial dan politik (Tulus *et al.*, 2016:36).

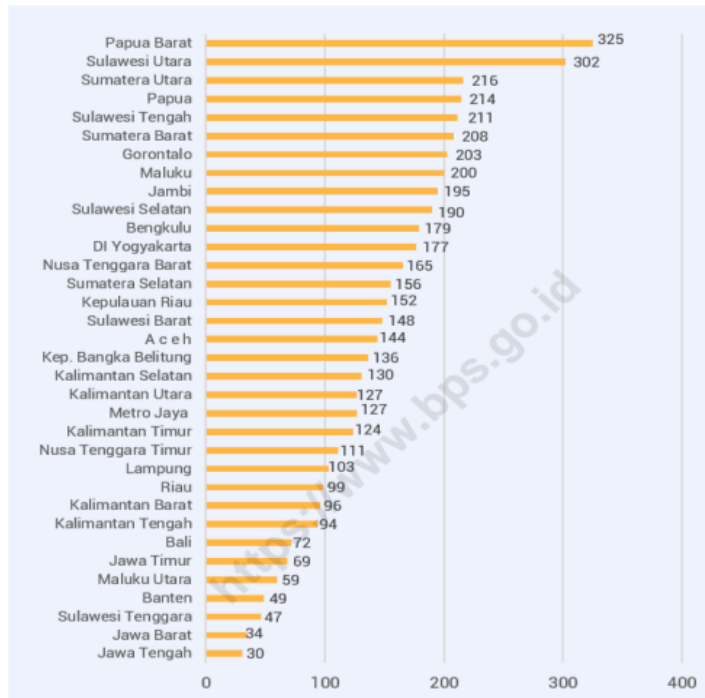
Periode pada tahun 2017-2019 konflik di Indonesia cenderung menurun. Pada tahun 2017 sebanyak 336.652 kejadian, menurun pada tahun 2018 sebanyak 294.281 kejadian dan menurun pada tahun 2019 menjadi 269.324 kejadian (Badan Pusat Statistik, 2020:9). Berdasarkan sisi jumlah kejahatan untuk level provinsi atau kepolisian daerah selama tahun 2019, kepolisian daerah Metro mencatat jumlah konflik terbanyak 31.934 kejadian, disusul oleh kepolisian Sumatera Utara sebanyak 30.831 kejadian dan kepolisian daerah Jawa Timur sebanyak 26.985 kejadian. Sementara itu, kepolisian daerah Sulawesi Tenggara, Kalimantan Utara, dan Maluku Utara merupakan tiga wilayah dengan jumlah konflik paling sedikit yaitu berturut-turut sebanyak 1.213, 876 dan 718. Berdasarkan *crime rate* kepolisian Papua Barat mencatat tingkat konflik tertinggi yaitu 325 (setiap 100.000 penduduk) disusul oleh kepolisian Sulawesi Utara sebanyak 302 kejadian

dan Sumatera Utara sebanyak 216 kejadian. Wilayah dengan tingkat konflik terendah adalah Jawa Tengah dan Jawa Barat (Badan Pusat Statistik, 2020:10).



Sumber: Badan Pusat Statistik (2020:11)

Gambar 1. Jumlah konflik yang dilaporkan menurut kepolisian daerah atau provinsi tahun 2019



Sumber: Badan Pusat Statistik (2020:12)

Gambar 2. Tingkat resiko terkena kejahatan menurut kepolisian daerah provinsi tahun 2019

Menurut Praditya (dalam Suratman, 2017:45), secara umum konflik internal di Indonesia disebabkan oleh faktor politik dan kelembagaan, faktor sosial ekonomi, faktor lingkungan dan sumber daya alam. Beberapa konflik yang pernah terjadi di Indonesia antara lain:

1. Konflik sosial di Desa Bugis dan Parangina, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima tahun 2014. Konflik tersebut disebabkan oleh perubahan sosial budaya, konflik yang terjadi antara individu dan kelompok atau perantara kelompok dengan kelompok (Mustamin, 2016:185).
2. Konflik sosial yang terjadi antara warga Monjok dan Karang Taliwang, Kota Mataram pada tahun 2019. Konflik tersebut disebabkan oleh pemindahan tempat sampah yang berada di Karang Taliwang ke tempat pemakaman umum (TPU), warga Monjok yang kebetulan berada di daerah Karang Taliwang. Keberadaan TPA dinilai mengganggu aktivitas warga sekitar. Tempat pembuangan sampah (TPS) yang sedari awal ditujukan

untuk kepentingan bersama namun kurang koordinasi dan sosialisasi, memicu aksi vandalisme warga Monjok (Yaqinah, 2019:2).

3. Konflik sosial yang terjadi antara kelompok agama di Desa Eretan Wetan, Kecamatan Kandanghaur, Kabupaten Indramayu pada tahun 2015. Saat itu di Desa Eretan Wetan, muncul isu yang berkembang terkait keberadaan keyakinan ISIS. Perkembangan isu tersebut menimbulkan konflik di masyarakat sekitar, terutama konflik antara masyarakat sekitar yang mayoritas beragama Islam (NU, Muhammadiyah, LDII dan Persis) dan 7 warga yang diduga pengikut ISIS (Maulana & Nulhaqim, 2011:16).
4. Konflik sosial antara masyarakat adat dan pendatang di Pondok Aren, Tangerang Selatan. Salah satu pemicu konflik antarbudaya mayoritas beretnis Betawi dan pendatang yang sebagian besar adalah kaum urban. Kaum urban tersebut berasal dari berbagai penjuru Indonesia. Penduduk kota ini mencari nafkah di wilayah Jakarta, namun memilih atau tinggal di perumahan pinggiran Jakarta, tempat tinggal mayoritas penduduk asli etnis Betawi (Suryawati, 2016:47).
5. Konflik sosial antara Humas PT Donggi Senoro Liquefied Natural Gas dengan masyarakat sekitar perusahaan Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah (Mahmud, 2019:1).
6. Konflik sosial antara Muslim dan Kristen di Poso, Provinsi Sulawesi Tengah. Penyebab konflik ini adalah permasalahan yang terkait dengan permasalahan sejarah mengenai masyarakat adat Poso yang merasa terpinggirkan dengan adanya pendatang dari luar Poso (Alganih, 2016:167).
7. Konflik sosial agama di Kota Bandung. Konflik ini terjadi antara umat Islam dan Kristen akibat berdirinya Gereja Protestan Batak Karo pada tahun 2016 (Rahmana, 2018:162)
8. Konflik sosial atas tanah *green letter* di Surabaya. Penyebab konflik karena perbedaan lahan surat hijau. Konflik juga disebabkan oleh dinamika sosial yang terjadi sebagai akibat dari kepentingan kelompok yang mempunyai tujuan rasional (Sukaryanto, 2016:171).

9. Konflik sosial antara masyarakat Nagari Padang Sibusuk dan Desa Kampung Baru, Kabupaten Sijunjung. Konflik disebabkan oleh berbagai faktor seperti ketidakpuasan, ego kelompok dan kepentingan (Trisno *et al.*, 2019:288).
10. Konflik sosial masyarakat pesisir atas penambangan pasir laut di Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang. Konflik disebabkan oleh aktivitas penambangan pasir di Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang, yang dianggap menimbulkan kerusakan lingkungan seperti abrasi dan kerusakan biota laut (Awan *et al.*, 2020:1).

Provinsi Lampung merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang strategis. Provinsi Lampung terletak di ujung Selatan Pulau Sumatera, menjadikan Provinsi Lampung sebagai satu-satunya pintu gerbang pulau Sumatera. Hal tersebut menjadi salah satu faktor yang menjadikan Provinsi Lampung ramai didatangi oleh para pendatang dari berbagai macam suku (Putri, 2018:79). Provinsi Lampung merupakan provinsi yang multietnik dengan berbagai suku, ras dan agama. Keberagaman suku / etnik di Provinsi Lampung disebabkan oleh suku pendatang yang bertransmigrasi dan disebabkan oleh suku pribumi Provinsi Lampung. Penduduk asli (pribumi) di Provinsi Lampung terdiri dari dua suku / kelompok besar yang mendiami wilayah dengan topografis yang berbeda (Ciciria, 2015:190).

Provinsi Lampung memiliki semboyan Sang Bumi Ruwa Jurai yang artinya Provinsi Lampung adalah tempat sebagai wujud rumah tangga besar yang terdiri dari dua unsur kelompok masyarakat yang mendiami wilayahnya. Keberagaman Provinsi Lampung disatu sisi menjadi keragaman khasanah budaya Lampung, namun di sisi lain keberagaman ini merupakan konflik yang mengancam integrasi sosial budaya di Provinsi Lampung, karena masing-masing suku atau bahkan sub suku saling menjunjung tinggi adat istiadat dan menganggapnya yang terbaik (Ciciria, 2015:191).

Tabel 1. Banyaknya konflik di Desa/Kelurahan yang terjadi selama tahun 2018

Kabupaten/Kota	Antar kelompok masyarakat	Kelompok masyarakat antar desa/kelurahan	Kelompok masyarakat dengan aparat keamanan	Kelompok masyarakat dengan aparat pemerintah	Pelajar	Lainnya
Lampung Barat						
Tanggamus		3				
Lampung Selatan	5	2		1		
Lampung Timur	5	1				
Lampung Tengah		2			2	1
Lampung Utara	1	1				
Way Kanan	4	1			3	1
Tulang Bawang						
Pesawaran						
Pringsewu	1	1				
Mesuji	1	4				2
Tulang Bawang Barat						
Pesisir Barat	2	1	1			
Bandar Lampung	2					
Metro					1	
Provinsi Lampung	21	16	1	1	6	4

Sumber : Statistik Keamanan Provinsi Lampung 2019:42

Konflik terjadi pada 44 desa/kelurahan yang terdapat di Provinsi Lampung. Angka perkelahian massal tertinggi terjadi pada jenis perkelahian antar kelompok masyarakat yang masih dalam satu desa/kelurahan yaitu sebanyak 21 kejadian dan 16 kejadian konflik perkelahian antar kelompok masyarakat antar desa/kelurahan. Pada tahun 2018 jumlah desa/kelurahan yang mengalami konflik perkelahian antar pelajar sebanyak 6 kejadian. Sementara itu perkelahian antar suku atau etnis sudah tidak ada kejadian di tahun 2018 (Statistik Keamanan Provinsi Lampung, 2018:42).

Keberagaman masyarakat di Lampung menyebabkan terjadinya konflik sebagai akibat prasangka dan kecemburuan sosial-ekonomi yang membawa unsur suku, agama dan ras. Misalnya terjadi konflik Mesuji, yang berawal pada 6 November 2010 sebagai akibat perambahan hutan produksi Register 45 dan Alpha 8 oleh suku pendatang (Jawa, Bali, Bugis) dengan Pamswakarsa (suku Lampung) yang dibentuk oleh PT. Silva In Hutani dan PT Bami. Selanjutnya konflik terjadi di Kecamatan Bekri, konflik di Lampung Tengah juga di Kecamatan Padang Ratu pada 24 Agustus 2013 yang juga melibatkan suku Lampung dan Jawa. Pada tanggal 27-29 Oktober 2013 konflik terjadi di Balinuraga dan konflik juga terjadi di Kecamatan Bunga Mayang, Kabupaten Tulang Bawang Barat pada 11 Maret 2016 yang melibatkan suku pribumi dan pendatang (Kesuma & Ciciria, 2018:239).

Berdasarkan data Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Mesuji, terjadi konflik sosial antara Desa Nabung, Kecamatan Sukadana dengan Desa Taman Asri, Kecamatan Purbolinggo, Lampung Timur tahun 2015. Tahun 2016, terjadi konflik sosial di Dusun Terang Agung, Kampung Gunung Terang, Kecamatan Gunung Terang, Kabupaten Tulang Bawang Barat. Tahun 2018 terjadi konflik sosial di Kabupaten Lampung Tengah. Serta tahun 2019 terjadi konflik sosial antara dua kelompok perbatasan Provinsi Sumatera Selatan dengan Provinsi Lampung lebih tepatnya di kawasan Register 45, Kabupaten Mesuji.

Konflik juga terjadi di Pekon Sukaraja, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus. Konflik Pekon Sukaraja terjadi antara masyarakat Suku Lampung di Pekon Waykerap, Karang Agung, dan Pardawaras dengan masyarakat Jawa asli dari Pekon Sukaraja. Konflik di Pekon Sukaraja dilatarbelakangi oleh tindak pidana pencurian yang mengakibatkan main hakim sendiri. Keluarga korban etnis Lampung tidak menerima terhadap tindakan main hakim sendiri tersebut dan mengerahkan massa untuk melakukan penyerangan ke Pekon Sukaraja sedangkan benih-benih konflik sudah ada sejak lama (Kesuma & Ciciria, 2018:241). Konflik tersebut berlangsung selama 2 hari (30-31 Juli 2013) yang mengakibatkan kerugian materiil lebih dari Rp. 1.000.000.000,00 (Ananto, 2017:4).

Latar belakang konflik terjadi semata-mata karena tindak pidana pencurian sepeda motor yang merajalela menjadi kerusuhan dan penjarahan. Tindak pidana pencurian hanya menjadi pemicu konflik. Prasangka sosial masing-masing suku membuat mereka tidak lagi mampu menyelesaikan masalah dengan musyawarah melainkan dengan main hakim sendiri. Suku Lampung memiliki prasangka bahwa suku pendatang telah mengalami pergeseran kehidupan ekonomi, karena banyak yang bersuku Jawa lebih sukses daripada suku Lampung (Kesuma & Ciciria, 2018:242).

Konflik horizontal yang terjadi di Pekon Sukaraja, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus berakhir dengan damai. Unsur Pimpinan Kecamatan (Uspika) Semaka telah melakukan mediasi kepada seluruh Kepala Pekon, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Pemuda di Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Proses mediasi damai tersebut dihadiri oleh Asisten 1 Bupati Tanggamus, Paksi Marga, Bupati Hermansyah, Kapolres Tanggamus AKBP Adri Effendi, Danrem 043 Gatam Lampung, Kolonel Inf Winarto, Dandim 0424 Tanggamus, Letkol Rusdian Parma, dan Kapolres Tanggamus AKBP Adri Effendi (Ananto, 2017: 5).

Berdasarkan Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanggamus tahun 2017, Kecamatan Semaka terdiri dari 22 pekon, 31,14% merupakan masyarakat pribumi Lampung

dan 54,36% merupakan suku Jawa dan 14,5% suku Sunda, suku Padang, suku Sumendo dan lainnya. Stereotip sebagian besar masyarakat suku Jawa terhadap suku Lampung dianggap sebagai preman dan pelaku sebagai tindak kriminal membuat suku Jawa mengedepankan tindakan main hakim sendiri serta mengesampingkan musyawarah. Sebaliknya, kesuksesan suku pendatang khususnya suku Jawa menimbulkan kecemburuan sosial-ekonomi bagi suku Lampung. Stereotip suku Lampung terhadap suku Jawa yang dianggap telah menggeser kehidupan ekonomi mereka, membuat suku Lampung melakukan aksi penjarahan harta benda suku Jawa di Pekon Sukaraja (Kesuma & Ciciria, 2018:250).

Masyarakat dan pemerintah tidak dapat menghindari konflik karena konflik merupakan bagian dari dinamika kehidupan masyarakat. Pemerintah dan masyarakat dapat mencegah konflik ini berubah atau berkembang menjadi kekerasan destruktif/destruktif. Upaya pemerintah dalam mencegah konflik dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang pasal 2 ayat 1 dan 2 memuat tentang pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya untuk melaksanakan pencegahan konflik.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, pasal 4 ruang lingkup penanganan konflik meliputi a) pencegahan konflik, b) penghentian konflik, c) pemulihan pasca konflik. Pencegahan konflik juga dapat dilakukan melalui komunikasi politik. Komunikasi yang dimaksud adalah komunikasi yang dilakukan oleh kepala desa dengan Badan Permusyawaratan Desa.

Tabel 2. Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	George B.B. Lantemona (Jurnal, 2016)	Strategi komunikasi pemerintah desa untuk konflik antar Jaga di Desa Sendangan, Kecamatan Kakas, Kabupaten Minahasa	Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Strategi yang dilakukan oleh pemerintah desa adalah menyediakan fasilitas penunjang bagi remaja untuk berolahraga. Fasilitas tersebut akan meningkatkan aktivitas remaja, seperti mengadakan perlombaan dan lain sebagainya. Pemerintah mampu mengorientasikan lingkungan melalui pendekatan emosional.
2.	Kammaludin Ahmad dan Ongki (Jurnal, 2019)	Peran kepala desa dalam menyelesaikan konflik antar masyarakat didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2015	Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Peran kepala desa dalam menyelesaikan konflik yang terjadi antar masyarakat di Desa Belo Kabupaten Bima yaitu pemerintah melakukan mediasi dalam upaya mempertemukan pihak-pihak yang berkonflik.
3.	Suhaimi, Darmawati, M. Fahli Zatrachadi, Yurnalis (Jurnal, 2020)	Pola komunikasi penyelesaian konflik antara suku Nias dan Batak, Desa Tanjung Mas, Kampar Kiri.	Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Pola komunikasi Desa Tanjung Mas agar terhindar dari konflik adalah perlu adanya komunikasi yang terbuka antar suku tanpa adanya pengelompokan antar suku, dengan berbaur akan mudah memahami adat istiadat masing-masing suku dan mulai beradaptasi satu sama lain. Sehingga jarak antara pendatang dan suku yang ada di desa akan terhindar. Pemberian upah yang setara juga perlu dilakukan sesuai kesepakatan antar suku sehingga meminimalisir terjadinya konflik di bidang ekonomi.
4.	Irfan Nopandi Ismail dan Muhammad Rais Rahmat (Jurnal, 2020)	Peran kepemimpinan kepala desa dalam menyelesaikan konflik sengketa tanah di Desa Cemba, Kabupaten Enrekang.	Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Hasil penelitian antara lain: 1) Hasil analisis pengolahan data frekuensi yang dilakukan menunjukkan bahwa peran Kepala Desa Cemba Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang sebesar 48,4% atau berada pada kategori cukup baik. 2) Analisis frekuensi pengolahan data diperoleh angka 44,34%, hal ini menunjukkan bahwa metode penyelesaian konflik sengketa tanah di Desa Cemba dalam keadaan baik.

Sumber : Diolah oleh peneliti tahun 2020

Perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian ini yaitu penelitian ini akan mengkaji lebih jauh dengan menggunakan paradigma Harold Lasswell tentang komunikasi politik kepala desa dengan Badan Permusyawaratan Desa, faktor-faktor yang mempengaruhi pencegahan konflik sosial di Pekon Sukaraja, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus. Pencegahan konflik adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencegah konflik dengan meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sistem peringatan dini. Hal itu dilakukan dengan menjaga kondisi damai di masyarakat, mengembangkan sistem penyelesaian sengketa secara damai, mengurangi potensi konflik dan membangun sistem peringatan dini.

Penelitian tentang komunikasi politik antara kepala desa dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam pencegahan konflik sosial di Pekon Sukaraja, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus ini penting dilakukan karena menggambarkan fenomena yang terjadi di masyarakat, menjelaskan hubungan antara fenomena dan masyarakat serta memperkirakan fenomena sosial yang mungkin terjadi di masa depan. Selain itu, penelitian ini juga penting dalam bidang ilmu pemerintahan karena membantu pemerintah daerah mengetahui tentang fenomena yang terjadi dimasyarakatnya dan membantu pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana komunikasi politik kepala desa dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam mencegah konflik sosial di Pekon Sukaraja, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus?
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi dalam pencegahan konflik sosial di Pekon Sukaraja, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui komunikasi politik kepala desa dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam mencegah konflik sosial di Pekon Sukaraja, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus?
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pencegahan konflik sosial di Pekon Sukaraja, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus?

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis

Penelitian ini bermanfaat sebagai tambahan pengetahuan dan wawasan akademik terkait komunikasi politik dan konflik sosial serta memberikan rekomendasi atau referensi dan mendorong penelitian progresif lebih lanjut.

2. Secara praktis

Penelitian ini bermanfaat sebagai masukan bagi bentuk komunikasi antara kepala desa dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam pencegahan konflik sosial di Pekon Sukaraja, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus, faktor-faktor yang mempengaruhi pencegahan konflik sosial di Pekon Sukaraja, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Tentang Komunikasi Politik

2.1.1 Pengertian Komunikasi Politik

Komunikasi politik adalah bidang studi baru dalam komunikasi. Komunikasi politik adalah komunikasi yang melibatkan aktor politik dan menyampaikan pesan politik atau terkait dengan kekuasaan, pemerintahan, dan kebijakan pemerintah (Aminah, 2018:221). Komunikasi politik merupakan kerangka politik sebagai upaya seorang aktor untuk mencapai tujuannya. Politik pada dasarnya tidak lain adalah berkomunikasi, yaitu menyampaikan gagasan kepada orang lain, dalam berkomunikasi setidaknya ada dua unsur penting yaitu komunikator politik dan kepemimpinan politik (Arumsari *et al.*, 2017:91).

Soyomukti (dalam Budianto, 2018:22) menjelaskan bahwa komunikasi politik berkaitan dengan masalah kemanusiaan dan hubungan sosial dimana kedekatan antara komunikasi dan politik merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari. Jika politik adalah suatu kebijakan mengenai pembagian nilai oleh penguasa, maka kebijakan tersebut dibuat berdasarkan pesan-pesan yang dikirimkan antara satu orang dengan orang lain, sehingga kebijakan yang dibuat tidak sepihak dan menimbulkan konflik antar kepentingan yang berbeda. Sederhananya, komunikasi politik merupakan gejala yang mengandung kepentingan politik.

Inti dari komunikasi politik adalah upaya kelompok manusia yang memiliki orientasi pemikiran politik atau ideologi tertentu untuk menguasai atau memperoleh kekuasaan, yang dengannya tujuan pemikiran politik dan ideologis dapat terwujud. Komunikasi politik tidak hanya menggambarkan interaksi langsung antara pembuat kebijakan dan warga negara. Media dalam hal ini sebenarnya menjadi jembatan antara satu komunitas dengan komunitas lainnya. Media lokal dalam demokratisasi daerah digunakan sebagai alat untuk saling mempengaruhi kebaikan dan juga saling menginspirasi antar daerah (Arumsari *et al.*, 2017:97).

2.1.2 Model Komunikasi Interpersonal

Komunikasi interpersonal menurut Rungapadianchy (dalam Rahmah, 2016:2) merupakan keterampilan yang dibutuhkan untuk berkomunikasi secara efektif dengan seseorang atau sekelompok orang. Menurut Lievens & Sakett (dalam Rahmah, 2016:2) komunikasi interpersonal adalah suatu keterampilan yang berkaitan dengan kepekaan sosial, membangun hubungan, bekerja dengan orang lain, mendengarkan dan berkomunikasi. Menurut Julia T. Wood (dalam Rahmah, 2016:2) model komunikasi interpersonal antara lain:

1. Model komunikasi linier

Model komunikasi linier dikemukakan oleh Claude Shannon dan Weaver pada tahun 1949 dalam bukunya *The Mathematical Of Communication*. Asumsi model komunikasi linier adalah komunikan pasif dan menerima pesan apa adanya dari komunikator (Nurudin, 2016: 219).

2. Model komunikasi interaksional

Model komunikasi interaksional dikembangkan oleh Wilbur Schramm pada tahun 1994. Komunikasi ini menggambarkan komunikasi sebagai suatu proses dimana pendengar memberikan umpan balik

sebagai tanggapan atas pesan yang disampaikan. Sistemnya ada pihak sebagai pengirim pesan dan ada pihak sebagai penerima pesan (Rahmah, 2016:2).

3. Model komunikasi transaksional

Model transaksional dikembangkan oleh Barnlund pada tahun 1970. Model komunikasi transaksional menekankan pada pola komunikasi yang dinamis dan berbagai peran yang dimainkan seseorang selama proses interaksi. Salah satu ciri model komunikasi transaksional terkait dengan suasana yang menunjukkan fakta bahwa pesan, gangguan dan pengalaman selalu berubah dari waktu ke waktu (Rahmah, 2016:2).

2.1.3 Gaya Komunikasi Politik

Menurut Teward L. Tubsbs dan Sylvia Moss (dalam Suryanto, 2015:321) ada 6 gaya komunikasi yaitu:

1. Gaya komunikasi mengendalikan (*the controlling style*)

Gaya komunikasi yang dikendalikan oleh suatu kehendak atau maksud, pikiran, pikiran dan tanggapan orang lain (Suryanto, 2015:321).

2. Gaya komunikasi dua arah (*the equalitarian style*)

Aspek penting gaya komunikasi ini adalah landasan. Orang-orang yang menggunakan gaya komunikasi ini adalah orang-orang yang memiliki sikap kepedulian yang tinggi serta kemampuan membina hubungan yang baik dengan yang lain, baik dalam konteks pribadi maupun hubungan kerja (Suryanto, 2015:321).

3. Gaya komunikasi terstruktur

Gaya komunikasi atau terstruktur memanfaatkan pesan lisan untuk memantapkan perintah yang harus dilaksanakan, penjadwalan tugas, pekerjaan serta struktur organisasi (Suryanto, 2015:321).

4. Gaya komunikasi dinamis (*the dinamic style*)

Gaya komunikasi yang dinamis ini memiliki kecenderungan yang agresif karena alarm siaga bahwa lingkungan pekerjaannya berorientasi pada tindakan. Tujuan utama gaya komunikasi dinamis yaitu menstimulasi atau merangsang karyawan untuk bekerja lebih cepat dan lebih baik (Suryanto, 2015:321).

5. *The relingiushing style*

Gaya komunikasi ini mencerminkan kesediaan untuk menerima saran, gagasan orang lain yang ingin memberi perintah terima kasih yang mempunyai hak untuk memerintah atau mengendalikan (Suryanto, 2015:321).

6. *The withdrawal style*

Akibat yang akan muncul jika gaya ini digunakan adalah melemahnya komunikasi. Artinya tidak ada keinginan orang-orang untuk memakai gaya ini untuk berkomunikasi dengan orang lain karena adanya beberapa kesulitan antarpribadi yang terhubung oleh orang-orang tersebut (Suryanto, 2015:321).

2.2 Tinjauan Tentang Konflik

2.2.1 Pengertian Konflik

Konflik berasal dari kata kerja yaitu *confiquire* yang artinya memukul. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai proses sosial antara dua orang atau lebih (bisa juga kelompok) dimana satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan cara menghancurkan atau membuatnya tidak berdaya (Irwandi, 2017:26). Konflik adalah perbedaan pemikiran, pandangan dan kepentingan individu atau kelompok dalam setiap tindakan sosial yang dilakukannya (Mustamin, 2016:186).

Konflik merupakan suatu proses yang dimulai ketika suatu pihak memiliki persepsi bahwa pihak lain telah memberikan pengaruh secara negatif. Definisi ini mencakup berbagai konflik ketidaksesuaian tujuan,

ketidaksepakatan yang disebabkan oleh ekspektasi perilaku dan sebagainya (Wahyudi, 2015:2). Menurut Nurdjana (dalam Wahyudi, 2015:3) mengartikan konflik sebagai akibat dari keadaan dimana perbedaan keinginan atau kemauan atau berlawanan satu sama lain.

Konflik merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh manusia terhadap manusia lainnya baik secara individu maupun kelompok, konflik merupakan tindakan kejahatan karena mencederai nilai-nilai kemanusiaan dan selalu memakan banyak korban, namun selama manusia masih hidup di muka bumi, konflik akan selalu ada. Konflik identik akan menimbulkan luka bagi yang terkena dampak konflik, terutama bagi mereka yang terlibat dalam konflik tersebut (Rochmat *et al.*, 2015:190).

Konflik diartikan sebagai interaksi antara dua pihak atau lebih yang saling bergantung tetapi dipisahkan oleh perbedaan tujuan dimana setidaknya salah satu pihak menyadari perbedaan tersebut dan mengambil tindakan. Implikasi dari definisi konflik di atas adalah:

1. Konflik dapat terjadi di dalam atau di luar sistem kerja regulasi.
2. Konflik harus diketahui setidaknya oleh salah satu pihak yang terlibat konflik.
3. Keberlanjutan bukanlah hal yang penting karena akan berhenti ketika suatu tujuan telah tercapai. (Tawakkal *et al.*, 2017:3).

2.2.2 Karakteristik Konflik

1. Konflik ekonomi

Konflik ekonomi terjadi karena perebutan sumber daya ekonomi yang terbatas. Beberapa contoh antara lain: 1) Konflik antara masyarakat dengan pemilik modal terkait sengketa tanah antara perusahaan dan masyarakat. 2) Konflik antara masyarakat dan pemerintah dalam kasus penambangan emas, timah dan pasir. 3) Konflik antara

masyarakat atas perampasan tanah. 4) Konflik antara warga dan preman dalam perebutan tempat parkir (Dyawati *et al.*, 2018:2). Menurut Charles Tilly (dalam Maternity *et al.*, 2018:18), konflik merupakan kepentingan yang sangat beragam, tidak hanya berfokus pada masalah ekonomi tetapi juga ideologi, politik dan identitas.

Konflik dapat terjadi karena berbagai alasan seperti perbedaan nilai, kepentingan dan tujuan, serta persaingan untuk memenangkan sesuatu. Konflik dapat berupa segala bentuk interaksi yang saling bertentangan atau kontradiktif yang disebabkan oleh beberapa faktor dari dalam. Bentuk konflik dapat terjadi dari *soft* menjadi *hard* dan *open* yang memiliki berbagai sumber dan umumnya mengacu pada dua dimensi yang meliputi dimensi fundamental (biasanya dipengaruhi oleh aspek budaya dan ideologi) dan dimensi instrumental (biasanya dipengaruhi oleh aspek politik dan ekonomi) (Maternity *et al.*, 2018:19).

2. Konflik Sosial

Konflik sosial merupakan konflik yang timbul karena masyarakat terdiri dari sejumlah kelompok sosial yang mempunyai karakteristik berbeda, masyarakat tersusun dalam kelompok dan strata yang berbeda. Beberapa contohnya adalah: 1) Kemiskinan ketika memicu konflik sosial dengan pengelompokkan warga yaitu golongan atas, menengah dan bawah. 2) Migrasi sosial dapat menimbulkan konflik dari satu daerah ke daerah lain. 3) Eksklusivitas grup dapat menyebabkan konflik dengan grup lain. 4) Konflik antara pribumi dan non-pribumi (Maternity *et al.*, 2018:20).

Menurut Collins (dalam Maternity *et al.*, 2018:20) memandang konflik sebagai pusat kehidupan masyarakat, struktur sosial tidak terlepas dari para aktor yang membentuknya, bahwa struktur sosial menjadi poros interaksi sosial antara individu dan komunitas. Collins

menjadikan struktur sosial mendekati inti teorinya, Collins menyatakan bahwa ada beberapa varian konflik diantaranya:

1. Setiap individu hidup dalam kondisi subjektif yang dibangunnya sendiri.
2. Adanya kekuatan orang lain untuk mempengaruhi atau mengontrol pengalaman subjektif individu.
3. Adanya kecenderungan individu untuk mengontrol orang yang sedang atau yang menentang subjektivitas individu.

3. Konflik Politik

Maswadi Rauf (dalam Zainul dan Wibisono Yusuf: 266) konflik politik berhubungan dengan negara atau pemerintah, para pejabat politik/pemerintah, politisi dan berkaitan dengan pengambilan keputusan/kebijakan. Maswadi Rauf menjelaskan konflik politik menekankan pada petentangan antar kelompok dengan menyangkut isu-isu politik atau proses pengambilan kebijakan dan keputusan. Aktor utama konflik politik merupakan elit politik karena mereka lah yang memiliki relasi pada pusaran kekuasaan.

Konflik politik disebabkan oleh dua hal. Konflik politik mencakup kemajemukan vertikal dan kemajemukan horizontal. Menurut Ali (dalam Zainul dan Wibisono Yusuf:266) kemajemukan horizontal merupakan struktur masyarakat yang majemuk secara kultural (suku bangsa, agama dan ras). Sedangkan menurut Ali (dalam Zainul dan Wibisono Yusuf:267) kemajemukan vertikal merupakan struktur masyarakat yang berlawanan menurut kepemilikan kekayaan, pengetahuan dan kekuasaan. Kemajemukan vertikal dapat menyebabkan konflik dikarenakan sebagian besar masyarakat tidak memiliki atau hanya memiliki sedikit kekayaan, pengetahuan dan kekuasaan akan memiliki kepentingan yang bertentangan dengan kelompok kecil masyarakat yang mendominasi.

Subakti (dalam Zainul dan Wibisono Yusuf :268) konflik politik dapat dibagi menjadi dua tipe yaitu konflik positif dan konflik negatif. Konflik positif yaitu konflik yang tidak mengancam eksistensi sistem politik, dikarenakan mekanisme penyelesaian konflik yang disepakati bersama dalam konstitusi. Konflik negatif merupakan konflik yang dapat mengancam eksistensi sistem politik yang biasanya disalurkan melalui cara-cara nonkonstitusional seperti kudeta, separatisme, terorisme dan revolusi.

2.2.3 Macam-Macam Konflik

Barkovitch (dalam Mellia *et al.*, 2021:137) memiliki perspektif yang berbeda dalam menentukan sumber konflik. Menurutnya konflik dapat dibedakan sebagai berikut:

1. Konflik intrapersonal, konflik yang dipicu oleh konflik batin dari individu.
2. Konflik interpersonal, konflik yang timbul dari interaksi manusia, yang dibagi menjadi dua faktor yaitu pribadi dan fungsional.
3. Konflik antar departemen, perbedaan struktur, tujuan, spesialisasi dan segala hal yang berkaitan dengan departemen/organisasi dimana interaksi mereka dengan departemen menimbulkan konflik.

2.2.4 Ciri-Ciri dan Tahapan Terjadinya Konflik

Menurut Wiyono (dalam Wahyudi, 2015:3) karakteristik konflik adalah:

1. Setidaknya dua pihak secara individu atau kelompok terlibat dalam interaksi yang saling bertentangan.
2. Setidaknya akan terjadi konflik antara kedua pihak secara individu maupun kelompok dalam mencapai tujuan, memainkan peran dan adanya konflik nilai atau norma.
3. Timbulnya interaksi yang sering ditandai dengan gejala perilaku yang direncanakan untuk saling menghilangkan, mengurangi dan menekan pihak lain guna memperoleh manfaat seperti status, kedudukan,

tanggung jawab, pemenuhan berbagai macam kebutuhan fisik, bahan pangan dan sandang dan kesejahteraan atau tunjangan-tunjangan tertentu.

4. Munculnya aksi-aksi berlawanan sebagai akibat konflik yang berkepanjangan.
5. Timbulnya keseimbangan karena upaya masing-masing pihak terkait kedudukan, status sosial, pangkat, golongan, wewenang, kekuasaan, harga diri, pretensi dan sebagainya.

2.2.5 Manajemen Konflik

Menurut James A F Stoner dan Charles (dalam Salim *et al.*, 2017:254) mengemukakan bahwa terdapat lima jenis konflik yaitu konflik intrapersonal, konflik interpersonal, konflik antar individu dan kelompok, konflik antar kelompok dan konflik antar organisasi. Manajemen konflik merupakan suatu keterampilan dan pengetahuan dalam menangani masalah konflik antara dua pihak yang berselisih atau lebih yang terjadi dalam satu kelompok atau dalam suatu organisasi (Hasanah, 2020:4).

Rusdiana (dalam Mellia *et al.*,2021:137) manajemen konflik adalah serangkaian tindakan dan reaksi antara aktor atau pihak luar dalam suatu konflik. Berkovitch (dalam Mellia *et al.*,2021:137) menyatakan bahwa fungsi utama manajemen konflik adalah untuk mengelola perselisihan atau menghindari eskalasi konflik. Penyelesaian konflik dapat mengacu pada menangani konflik atau menghilangkan sumber konflik.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012 pasal 4 ayat 1,2,3 tentang Penanganan Konflik Sosial, manajemen konflik disebut penanganan konflik. Penanganan konflik adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam situasi dan peristiwa baik sebelum, selama maupun setelah konflik yang meliputi:

1. Pencegahan konflik adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencegah konflik dengan meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sistem peringatan dini. Hal itu dilakukan dengan menjaga kondisi damai di masyarakat, mengembangkan sistem penyelesaian sengketa secara damai, mengurangi potensi konflik dan membangun sistem peringatan dini.
2. Penghentian konflik adalah rangkaian kegiatan untuk mengakhiri kekerasan, menyelamatkan korban, membatasi perluasan dan eskalasi konflik serta mencegah bertambahnya jumlah korban dan kerugian harta benda. Beberapa upaya yang dilakukan dalam proses penghentian konflik seperti penghentian dengan kekerasan fisik, penetapan status suatu negara konflik, tindakan penyelamatan darurat dan perlindungan korban serta pendampingan dalam penggunaan dan mobilisasi kekuatan TNI.
3. Pemulihan pasca konflik yaitu rangkaian kegiatan pemulihan situasi dan perbaikan hubungan yang tidak harmonis dalam masyarakat akibat konflik melalui kegiatan rekonsiliasi, rehabilitasi dan rekonstruksi.

Tujuan dari manajemen konflik secara umum adalah memberikan fokus terutama pada pencapaian visi, misi dan tujuan suatu lembaga atau organisasi, menghargai perbedaan atau keragaman dalam suatu lembaga, meningkatkan pemikiran kreatif, meningkatkan kualitas suatu kebijakan berdasarkan pengambilan informasi dan perspektif yang berbeda, menciptakan mekanisme atau teknik penyelesaian konflik yang lebih efektif, menciptakan suasana kelembagaan yang lebih terfokus pada lingkungan kerja yang menyenangkan, meningkatkan loyalitas dan komitmen pada lembaga serta memudahkan pelaksanaan tugas dan pekerjaan dalam suatu lembaga (Hasanah, 2020:5).

2.2.6 Teori Komunikasi Harold Lasswell

Teori komunikasi Harold Lasswell menyatakan bahwa dalam proses komunikasi terdapat lima hal yang harus dilalui yaitu *who* (siapa), *says what* (mengatakan apa), *in with channel* (melalui media apa), *to whom* (kepada siapa), *with that effect* (dengan efek apa) (Misyuniarto, 2019:30). Mengenai hal tersebut akan lebih dijelaskan sebagai berikut:

- a. *Who* (siapa/komunikator)
Siapa merupakan siapa yang menjadi pelaku utama dalam berkomunikasi. Pelaku utama memiliki maksud yang memulai di dalam suatu komunikasi (Misyuniarto, 2019:31).
- b. *Says what* (pesan)
Pesan merupakan isi dari suatu komunikasi berupa informasi. Informasi yang disampaikan dapat berupa verbal maupun non verbal yang dapat mewakili perasaan, gagasan, maksud nilai dan sumber. Komponen pesan dalam hal ini yaitu makna, simbol dan bentuk pesan (Misyuniarto, 2019:31).
- c. *In with channel* (saluran/media)
Media merupakan alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan baik secara langsung (tatap muka) ataupun secara tidak langsung (media cetak/elektronik) (Misyuniarto, 2019:31).
- d. *To whom* (penerima/komunikan)
Komunikan merupakan seseorang yang menerima pesan yang disampaikan oleh komunikator (Misyuniarto, 2019:31).
- e. *With what effect* (dampak/ efek)
Merupakan dampak yang terjadi pada komunikan setelah menerima pesan dari komunikator, seperti perubahan sikap dan bertambahnya pengetahuan (Misyuniarto, 2019:31).

2.3 Kerangka Pikir

Model komunikasi politik yang dapat digunakan oleh kepala desa dengan Badan Permusyawaratan Desa yaitu

1. Menurut Rungapadianchy (dalam Rahmah, 2016:2), model komunikasi interpersonal merupakan keterampilan yang dibutuhkan untuk berkomunikasi secara efektif dengan seseorang atau sekelompok orang. Model komunikasi interpersonal dibagi menjadi :
 - a. Model komunikasi linier. Asumsi model komunikasi linier merupakan komunikasi pasif dan menerima pesan apa adanya dari komunikator (Nurudin, 2016: 219).
 - b. Model komunikasi interaksional. Komunikasi ini menggambarkan komunikasi sebagai proses dimana pendengar memberikan umpan balik sebagai tanggapan atas pesan yang disampaikan. Sistemnya terdapat pihak sebagai pengirim pesan dan pihak sebagai penerima pesan (Rahmah, 2016:2).
 - c. Model komunikasi transaksional. Ciri model komunikasi transaksional berkaitan dengan suasana yang menunjukkan fakta bahwa pesan, gangguan dan pengalaman selalu berubah dari waktu ke waktu (Mariyatul Norhidayati Rahmah, 2016:2).

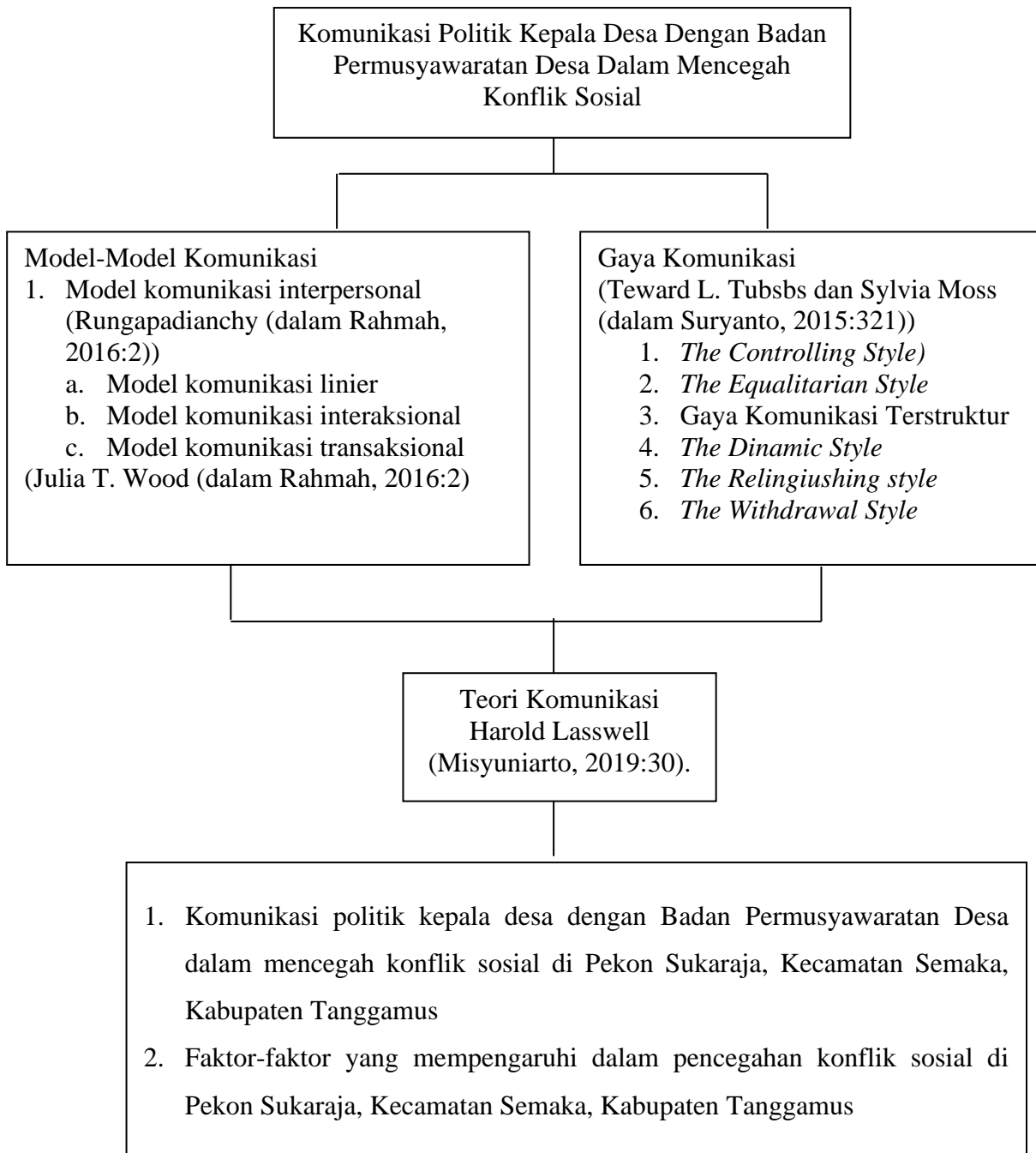
Gaya komunikasi yang dapat digunakan menurut Teward L. Tubsbs dan Sylvia Moss (dalam Suryanto, 2015:321) terdapat 6 gaya komunikasi yaitu:

1. *The controlling style*, gaya komunikasi yang mengontrol ditandai dengan adanya kemauan atau tujuan membatasi, memaksa dan mengatur tingkah laku, pikiran dan tanggapan orang lain (Suryanto, 2015:321).
2. *The equalitarian style*, aspek penting dari gaya komunikasi ini adalah dasar kesamaan (Suryanto, 2015: 321).
3. Gaya komunikasi terstruktur, gaya komunikasi terstruktur memanfaatkan pesan lisan dan tertulis untuk memperkuat perintah yang harus dilaksanakan, penjadwalan tugas, pekerjaan dan struktur organisasi (Suryanto, 2015:321).

4. *The dinamic style*, tujuan utama gaya komunikasi dinamis adalah untuk merangsang karyawan agar bekerja lebih cepat dan lebih baik. (Suryanto, 2015: 321).
5. *The relingiushing style*, gaya komunikasi ini mencerminkan kesediaan untuk menerima saran, pendapat atau gagasan orang lain daripada keinginan untuk memberi perintah meskipun pengirim pesan memiliki hak untuk mengatur atau mengontrol (Suryanto, 2015:321).
6. *The withdrawal style*, akibat yang akan timbul jika gaya ini digunakan adalah melemahnya tindakan berkomunikasi (Suryanto, 2015:321).

Berdasarkan penjelasan diatas peneliti akan memaparkan fokus penelitian dengan menggunakan teori komunikasi Harold Lasswell. Paradigma Harold Lasswel menyatakan bahwa dalam proses komunikasi terdapat lima hal yang harus dilalui yaitu *who* (siapa), *says what* (mengatakan apa), *in with channel* (melalui media apa), *to whom* (kepada siapa), *with that effect* (dengan efek apa).

Berikut ini adalah kerangka pikir:



Sumber : Diolah oleh peneliti tahun 2020

Gambar 3. Kerangka Pikir

III. METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Menurut Strauss dan Corbin (dalam Surayya, 2018:77), penelitian kualitatif adalah penelitian yang temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk perhitungan lainnya. Kehadiran peneliti eksplisit dalam situasi tertentu karena mereka memiliki interaksi yang intens dengan realitas yang mereka teliti. Penelitian ini didasarkan pada perspektif naturalistik, interpretatif, post-positivistik dan teori postmodernisme yang berupaya mengkonstruksi realitas dan memahami maknanya dengan memperhatikan proses, peristiwa dan otentisitas.

Penelitian kualitatif umumnya menggunakan bahasa informal dan pribadi seperti pemahaman, penemuan, dan pemaknaan. Secara metodologis, penelitian kualitatif menggunakan logika induktif melalui pengkategorian data yang diperoleh selama penelitian, sehingga menghasilkan pola atau teori yang mampu menjelaskan fenomena yang terjadi (Surayya, 2018:77). Menurut Miles dan Hiberman, penelitian kualitatif merupakan suatu proses investigasi dimana peneliti secara perlahan menginterpretasikan suatu fenomena sosial dalam membedakan, membandingkan, menduplikasi, membuat katalog dan mengklasifikasikan objek penelitian. Tujuan penelitian kualitatif (pernyataan tujuan kualitatif) secara umum mencakup informasi tentang fenomena sentral yang dieksplorasi dalam penelitian, partisipan penelitian dan lokasi penelitian (Creswell, 2016:376).

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena fenomena yang diteliti dalam penelitian ini membutuhkan data lapangan faktual melalui observasi yang

mendalam. Tingkat kealaman penelitian kualitatif merupakan hal yang utama, peneliti membenamkan diri pada masalah dan kondisi yang terjadi dalam konteks peneliti. Peneliti langsung terjun ke lapangan pada berbagai sisi peristiwa yang terjadi pada saat observasi berlangsung (Yusanto, 2020:2). Berdasarkan uraian tersebut peneliti menggunakan metode deskriptif karena sesuai dengan masalah yang ada, peneliti akan mendeskripsikan komunikasi politik kepala desa dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam mencegah konflik sosial di Pekon Sukaraja, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus dan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pencegahan konflik sosial di Pekon Sukaraja, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini dilakukan di Pekon Sukaraja, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Alasan peneliti memilih lokasi penelitian ini karena untuk mengetahui komunikasi politik antara kepala desa dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam mencegah konflik sosial di Pekon Sukaraja, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus, dan informasi serta dokumentasi dapat diperoleh dari lokasi penelitian yang telah ditentukan. Cara menentukan lokasi penelitian yang baik adalah dengan cara mempertimbangkan teori substantif dan mendalami lapangan untuk menemukan kesesuaian sebagai bahan pertimbangan untuk menemukan lokasi penelitian.

3.3 Fokus Penelitian

Menurut Sugiyono (2018:396), fokus penelitian pada penelitian kualitatif adalah keterbatasan masalah seperti keterbatasan tenaga, dana, waktu. Hasil penelitian lebih terfokus sehingga peneliti tidak akan melakukan penelitian tentang segala hal tetapi menentukan fokus. Fokus penelitian ini adalah:

1. Komunikasi politik antara kepala desa dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam pencegahan konflik sosial di Pekon Sukaraja, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pencegahan konflik sosial di Pekon Sukaraja, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus.

3.4 Informan Penelitian

Menurut Djam'an dan AAn Komariah (dalam Paiman *et al.*, 2019:503), informan adalah orang yang berlatar belakang penelitian. Fungsinya memberikan informasi tentang situasi dan kondisi setting penelitian. Menurut Afrizal (dalam Paiman *et al.*, 2019:503), informan penelitian adalah orang-orang yang memberikan informasi tentang dirinya atau orang lain atau suatu peristiwa atau sesuatu kepada peneliti atau pewawancara mendalam.

Peneliti memilih informan yang dipandang memiliki pengetahuan yang baik mengenai komunikasi politik kepala desa dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam mencegah konflik sosial, informan yang terlibat dalam kegiatan peneliti, informan yang memiliki data penelitian yang akurat terhadap penelitian peneliti, informan yang memiliki waktu tersendiri untuk dapat diminta informasi serta mampu menjawab rumusan masalah mengenai komunikasi politik kepala desa dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam mencegah konflik sosial di Pekon Sukaraja, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus serta mampu menjawab rumusan masalah terkait faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pencegahan konflik sosial di Pekon Sukaraja, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus. Informan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Berdasarkan pernyataan diatas, maka peneliti menetapkan beberapa informan yaitu:

- a. Kepala Desa

Peneliti memilih kepala Pekon Sukaraja, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus adalah untuk mencari informasi yang mengenai komunikasi yang digunakan kepala desa dalam mencegah konflik sosial.

b. Badan Permusyawaratan Desa

Peneliti memilih Badan Permusyawaratan Desa, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus adalah untuk mencari informasi mengenai komunikasi politik yang digunakan Badan Permusyawaratan Desa dalam mencegah konflik sosial.

c. Perangkat desa

Peneliti memilih perangkat desa Pekon Sukaraja, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus adalah untuk mengetahui informasi dari sudut pandang perangkat desa terkait komunikasi politik kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang digunakan dalam mencegah konflik sosial.

d. Masyarakat dan tokoh adat

Peneliti memilih masyarakat dan tokoh adat, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus adalah untuk mendukung data yang diperoleh dari informan kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa, perangkat desa dan untuk menambah informasi dari sudut pandang masyarakat dan tokoh adat.

e. Data informan

Tabel 3. Data informan dalam penelitian

No	Nama	Status/Jabatan	Topik Wawancara
1.	Boimin	Kepala Pekon Sukaraja (2016-2021)	Komunikasi dan Konflik
2.	Ma'it	Ketua Badan Permusyawaratan Desa	Komunikasi dan Konflik
3.	Hermansyah	Perangkat desa	Komunikasi dan Konflik
4.	Sawirudin	Kepala adat Pekon Sukaraja	Komunikasi dan Konflik
5.	Mislan	Masyarakat Pekon Sukaraja	Komunikasi dan Konflik
6.	Suryati	Masyarakat Pekon Sukaraja	Komunikasi dan Konflik
7.	Harni	Masyarakat Pekon Sukaraja	Komunikasi dan Konflik
8.	Hasanah	Masyarakat Pekon Sukaraja	Komunikasi dan Konflik
9.	Mesinah	Masyarakat Pekon Sukaraja	Komunikasi dan Konflik
10.	Johan	Kepala Desa (2009-2016)	Komunikasi dan Konflik

Sumber : Diolah oleh peneliti 2021

3.5 Jenis Data

1. Data primer

Data primer merupakan sumber data yang secara langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber asli (lapangan dan informan) yang mempunyai informasi tentang data tersebut. Data primer dapat berupa teks hasil wawancara dan diperoleh melalui wawancara dengan informan yang dijadikan sampel dalam penelitian dan data primer dapat direkam oleh peneliti. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh peneliti melalui wawancara yang mendalam dan observasi ke lokasi penelitian (Sugiyono, 2018:308).

2. Data sekunder

Data sekunder merupakan sumber yang tidak secara langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau melalui dokumen. Jadi data sekunder dapat berupa data yang sudah tersedia yang dapat diperoleh peneliti dengan membaca, melihat atau menyimak. Data sekunder juga dapat berasal dari data primer yang telah diolah oleh peneliti sebelumnya (Sugiyono, 2018:308).

Data sekunder dalam penelitian ini yaitu:

1. Data jumlah konflik yang dilaporkan menurut kepolisian daerah atau provinsi tahun 2019
2. Data tingkat resiko terkena kejahatan menurut kepolisian tahun 2019
3. Data banyaknya konflik di Desa/Kelurahan yang terjadi selama tahun 2018
4. Data jumlah penduduk Pekon Sukaraja, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus
5. Data jumlah prasarana kesehatan Pekon Sukaraja, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus.
6. Data pola konsumsi masyarakat Pekon Sukaraja, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus

7. Data kegiatan Pekon Sukaraja tahun 2020
8. Data berupa gambar tugu perdamaian pasca resolusi konflik di Pekon Sukaraja, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus
9. Data berupa gambar konflik sosial tahun 2013 di Pekon Sukaraja, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus
10. Dokumen lain berupa buku, jurnal ilmiah, skripsi yang mendukung dalam penelitian ini.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data (Paiman *et al.*, 2019:504). Adapun teknik atau metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Nasution (dalam Sugiyono, 2018:310), menyatakan bahwa observasi adalah dasar dari segala ilmu. Menurut Marshal (dalam Sugiyono, 2018:310) menjelaskan bahwa melalui observasi, peneliti belajar tentang tingkah laku dan makna tingkah laku tersebut. Sanafiah Faisal (dalam Sugiyono, 2018: 310), mengklasifikasikan observasi sebagai berikut:

a) Observasi partisipatif (*participant observation*)

Peneliti terlibat dengan aktivitas sehari-hari orang yang diobservasi atau yang dijadikan sebagai sumber data penelitian. Peneliti akan ikut melakukan apa yang dilakukan sumber data dan merasakan suka dan duka. Data yang diperoleh dalam observasi partisipan akan lebih lengkap, tajam dan untuk mengetahui tingkat makna dari setiap tingkah laku yang terlihat (Sugiyono, 2018:310).

b) Observasi terus terang atau tersamar

Peneliti dalam mengumpulkan data menyatakan secara terus terang kepada sumber datanya bahwa peneliti sedang melakukan penelitian sehingga yang diteliti mengetahui dari awal sampai akhir tentang aktivitas peneliti. Namun dibeberapa titik peneliti juga tidak jujur dalam pengamatannya, hal ini untuk menghindari jika data yang dicari adalah data rahasia, jika dilakukan secara terus terang peneliti tidak akan diperkenankan untuk melakukan observasi (Sugiyono, 2018:310).

c) Observasi tidak terstruktur

Pengamatan dalam penelitian kualitatif dilakukan secara tidak terstruktur, karena fokus penelitian tidak jelas. Fokus observasi akan berkembang seiring dengan berlangsungnya aktivitas observasi. Masalah penelitian jika sudah jelas seperti dalam penelitian kuantitatif, maka observasi dapat dilakukan secara terstruktur dengan menggunakan pedoman observasi. Pengamatan tidak terstruktur merupakan pengamatan yang tidak disusun secara sistematis tentang apa yang akan diamati. Hal ini dilakukan karena peneliti tidak mengetahui secara persis hal yang harus diamati. Pengamatan tidak menggunakan instrumen yang terstandar, tetapi hanya berupa observasi rambu-rambu (Sugiyono, 2018:311).

Penelitian tentang komunikasi politik kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam pencegahan konflik sosial di Pekon Sukaraja, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus, peneliti menggunakan observasi terbuka atau terselubung dan observasi tidak terstruktur. Pengamatan secara terus terang, peneliti menyatakan terus terang kepada narasumber bahwa peneliti melakukan penelitian. Peneliti juga memilih observasi tidak terstruktur dengan alasan fokus observasi akan berkembang seiring dengan berlangsungnya aktivitas observasi.

2. Wawancara

Menurut Esterbaerg (dalam Sugiyono, 2018:317), mengartikan wawancara yaitu pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan gagasan melalui pertanyaan dan tanggapan, sehingga terjadi komunikasi dan konstruksi makna yang sama tentang suatu topik tertentu. Menurut Esterberg (dalam Sugiyono, 2018:319), wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur dan dapat dilakukan secara tatap muka maupun melalui telepon.

Wawancara merupakan proses penting dalam melaksanakan suatu penelitian, khususnya dalam penelitian kualitatif. Secara umum pewawancara harus berusaha mendapatkan kerjasama yang baik dari subjek penelitian (responden). Dukungan dari responden sangat bergantung pada bagaimana peneliti menjalankan tugasnya, karena tujuan dari wawancara adalah untuk mendapatkan informasi yang dianggap data tersebut diperlukan untuk membuat rumusan yang sebaik mungkin untuk mencapai tujuan penelitian (Rosaliza, 2015:71).

a) Wawancara terstruktur (*structured interview*)

Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data ketika peneliti atau pengumpul data yakin tentang informasi yang akan diperoleh. Oleh karena itu dalam melakukan wawancara, pengumpul data lebih dahulu menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan tertulis yang alternatif jawaban telah disiapkan (Hidayah. *et al*, 2018:77).

b) Wawancara semistruktur (*semistruktur interview*)

Jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori wawancara mendalam yang pada praktiknya lebih bebas jika dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan masalah secara lebih terbuka dimana yang diwawancarai dimintai pendapat dan idenya serta dalam melakukan wawancara peneliti

perlu menyimak dan mencatat hal yang dilakukan informan (Pratiwi & Syafiq, 2015:100).

c) Wawancara tidak terstruktur (*unstructured interview*)

Wawancara dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah terstruktur secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan data. Panduan wawancara hanyalah garis besar dari masalah yang ditanyakan. Wawancara tidak terstruktur sering digunakan dalam penelitian yang lebih mendalam tentang suatu subjek yang diteliti (Pratiwi & Syafiq, 2015:100).

Wawancara dalam penelitian ini berupa tanya jawab antara peneliti dan informan mengenai bagaimana komunikasi politik antara kepala desa dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam mencegah konflik sosial di Pekon Sukaraja, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus. Peneliti menggunakan wawancara terstruktur. Peneliti menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan tertulis yang telah disiapkan alternatif jawaban. Penulis juga akan menggunakan wawancara semistruktur (*semistruktur interview*) dan wawancara tidak terstruktur (*unstructured interview*) untuk menemukan masalah secara lebih terbuka. Adapun waktu pelaksanaan wawancara disajikan dalam waktu berikut:

Tabel 4. Waktu pelaksanaan wawancara

No	Nama	Jabatan	Waktu wawancara
1.	Boimin	Kepala Pekon Sukaraja (2016-2021)	Rabu, 20 Januari 2021 pukul 17.10 s.d selesai
2.	Ma'it	Ketua Badan Permusyawaratan Desa	Jum'at, 22 Januari 2021 s.d selesai
3.	Hermansyah	Perangkat desa	Senin, 25 Januari 2021 pukul 10.03 WIB s.d selesai
4.	Sawirudin	Kepala adat Pekon Sukaraja	Sabtu, 30 Januari 2021, pukul 14.00 WIB s.d selesai
5.	Mislan	Masyarakat Pekon Sukaraja	Sabtu, 6 Februari 2021, pukul 15.02 WIB s.d selesai
6.	Suryati	Masyarakat Pekon Sukaraja	Sabtu, 6 Februari 2021, pukul 15.48 WIB s.d selesai
7.	Mesinah	Masyarakat Pekon Sukaraja	Sabtu, 13 Februari 2021, pukul 17.00 WIB s.d selesai
8.	Harni	Masyarakat Pekon Sukaraja	Sabtu, 13 Februari 2021, pukul 17.40 WIB s.d selesai
9.	Hasanah	Masyarakat Pekon Sukaraja	Jumat, 19 Februari 2021, pukul 12.32 WIB s.d selesai
10.	Johan	Kepala Desa (2009-2016)	Sabtu, 17 Juli 2021, pukul 10.22 WIB s.d selesai

Sumber: Diolah oleh peneliti tahun 2021

3. Dokumentasi

Menurut Widyoko (2015:50) makna dokumentasi dibedakan menjadi dua yaitu makna sempit dan makna luas. Dokumentasi dalam arti sempit adalah benda atau benda tertulis, sedangkan dokumentasi dalam arti luas adalah dokumen tidak hanya berupa tulisan tetapi dapat berupa peninggalan seperti prasasti dan simbol lainnya. Dokumen dalam penelitian ini berupa dokumen yang didapatkan peneliti saat observasi di Pekon Sukaraja dan data sekunder lainnya berupa buku, jurnal penelitian, website serta foto-foto yang sesuai dengan penelitian dan rekaman suara saat wawancara. Metode pengumpulan data dokumentasi menggunakan *handphone* untuk keperluan foto dan

recording serta buku catatan untuk mencatat segala hal yang berhubungan dengan wawancara.

3.7 Teknik Pengolahan Data

Setelah data terkumpul dari lapangan, langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah pengolahan data. Teknik pengolahan data menurut Ibrahim (2015:101) adalah sebagai berikut:

1. *Editing* merupakan proses pengecekan kebenaran data, penyesuaian data untuk memudahkan proses pemilihan data. *Editing* juga diartikan sebagai kegiatan dalam penelitian yang dilakukan dengan mendefinisikan kembali data yang diperoleh untuk memastikan validitasnya dan segera disiapkan untuk proses selanjutnya. Penelitian ini penulis mengolah data wawancara sesuai pertanyaan dengan fokus pedoman wawancara serta memilah dan menentukan data yang dibutuhkan untuk penulisan. Mengolah kegiatan observasi yaitu penulis mengumpulkan data yang menarik dari hasil observasi agar dapat ditampilkan dengan baik (Ibrahim, 2015:101).
2. Interpretasi data, dilakukan dengan mendeskripsikan jawaban informan dalam bentuk deskriptif. Peneliti memberikan gambaran tentang berbagai data yang telah melalui tahap *editing* sesuai dengan fokus penelitian. Data yang dimiliki memiliki arti bahwa kegiatan analisis data akan dilakukan berdasarkan hasil observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Penulis berusaha memilih kata-kata terbaik agar tidak menimbulkan kesan yang dapat merugikan berbagai pihak (Ibrahim, 2015:101).

3.8 Teknik Analisis Data

Menurut Bogdan (dalam Sugiyono, 2018:334), analisis data merupakan proses mencari dan menghimpun data secara sistematis yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan materi lainnya agar lebih mudah dipahami dan temuannya

dapat dibagikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasi data, memecahnya menjadi beberapa unit, mensintesisnya, menyusunnya menjadi pola, memilih hal yang penting dan hal yang akan dipelajari serta membuat kesimpulan yang dapat dibagikan kepada orang lain. Noeng Muhadjir (dalam Rijali, 2019:84) mengemukakan bahwa analisis data merupakan upaya menemukan dan menyusun catatan secara sistematis atas observasi, wawancara dan lain-lain untuk meningkatkan pemahaman peneliti terhadap kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain.

Menurut Sugiyono (2018: 338), teknik analisis data mencakup tiga komponen analisis, yaitu:

1. *Data reduction* (reduksi data)

Reduksi data adalah proses pemilihan, dengan fokus pada penyederhanaan, abstraksi dan transformasi data mentah yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Proses ini terus berlangsung selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul dilihat dari kerangka konseptual penelitian, masalah kajian dan pendekatan pengumpulan data yang dipilih oleh peneliti (Rijali, 2019:91).

Mengurangi data berarti meringkas, memilih hal-hal utama, memfokuskan pada hal-hal penting, mencari tema dan pola serta menghilangkan yang tidak perlu. Data yang dikurangi memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan peneliti untuk mengumpulkan data lebih lanjut dan mencarinya jika diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer mini dengan pemberian kode pada aspek tertentu (Sugiyono, 2018:338). Penelitian ini memilih data yang diperoleh selama penelitian tentang komunikasi politik kepala desa dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam pencegahan konflik sosial di Pekon Sukaraja Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus. Peneliti memilih data yang tidak sesuai dengan fokus penelitian dan data yang sesuai akan ditulis secara sistematis.

2. Data display (penyajian data)

Penyajian data adalah suatu kegiatan ketika sekumpulan informasi dikompilasi sehingga memberikan kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan mengambil tindakan. Bentuk penyajian data kualitatif dapat berupa teks naratif berupa catatan lapangan, matriks, grafik, jaringan dan bagan. Formulir-formulir tersebut menggabungkan informasi yang tersusun secara koheren dan mudah diakses sehingga memudahkan untuk melihat hal yang terjadi, apakah kesimpulannya benar atau melakukan analisis ulang (Rijali, 2019:94). Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2018:41) yang sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah teks naratif. Penelitian ini akan memaparkan komunikasi politik antara kepala desa dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam mencegah konflik sosial di Pekon Sukaraja, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus.

3. *Conclusion drawing* (verifikasi kesimpulan)

Tahap ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Hiberman (dalam Sugiyono, 2018:345) adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah jika tidak ditemukan bukti yang kuat untuk mendukung tahap pengumpulan data selanjutnya, namun jika kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung dengan bukti yang valid dan konsisten pada saat peneliti kembali ke bidang penelitian. mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan adalah kesimpulan yang kredibel. Kesimpulan diverifikasi selama penelitian dengan 1) memikirkan kembali selama penulisan, 2) meninjau catatan lapangan, 3)) tinjauan kembali dan pertukaran untuk mengembangkan kesepakatan subjektif, 4) upaya ekstensif untuk menemukan salinan temuan dikumpulan data lain (Rijali, 2019:94).

3.9 Teknik Validasi Data

Teknik validasi tidak hanya digunakan untuk menyangkal hal yang dituduhkan terhadap konsep penelitian kualitatif yang menyatakan bahwa penelitian ini tidak bersifat ilmiah, akan tetapi teknik pemeriksaan keabsahan data tersebut merupakan tahapan yang tidak lepas dari tubuh pengetahuan dalam penelitian kualitatif (Mekarisce, 2020:147). Menguji keabsahan data dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi yaitu pengecekan keabsahan data yang menggunakan sesuatu selain data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut dan teknik triangulasi yang paling banyak digunakan adalah dengan cara mengecek melalui sumber lain. Teknik keabsahan data menggunakan triangulasi metode. Triangulasi metode artinya peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda untuk mendapatkan sumber yang sama dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi (Fakhruddin, 2017:26).

IV. GAMBARAN UMUM

4.1 Gambaran Umum Lokasi Pekon Sukaraja, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus

4.1.1 Sejarah Pekon Sukaraja

Pada zaman penjajahan Belanda tahun 1937 tepatnya pada hari jum'at legi sebanyak 124 kepala rumah tangga diberangkatkan trans kolonisasi dari Ponogoro-Jawa Timur ke Batavia. Sesampainya di Batavia kemudian transit ke pulau Lampung tepatnya di Kemiling. Sesampainya di Kemiling, 24 kepala rumah tangga dibuang ke Way Sukaraja. Pada saat itu dikepalai oleh seorang kepala rombongan yang bernama Seko Diharjo. Mereka bertahan hidup seadanya ditengah-tengah hutan belantara membuat suatu perkampungan yang bernama Way Sukaraja dan ketua rombongan tersebut diangkat sebagai kepala kampung yang pertama hingga sekarang sudah beralih 20 orang yang memimpin Sukaraja baik secara definitif maupun pejabat sementara. Kemudian Pekon Sukaraja dimekarkan menjadi 4 pekon yang pertama Pekon Tugu Papak, Pekon Bangun Rejo, Pekon Kacapura dan Pekon Sedayu (Ananto, 2017:54).

4.1.2 Kondisi Geogafis Pekon Sukaraja

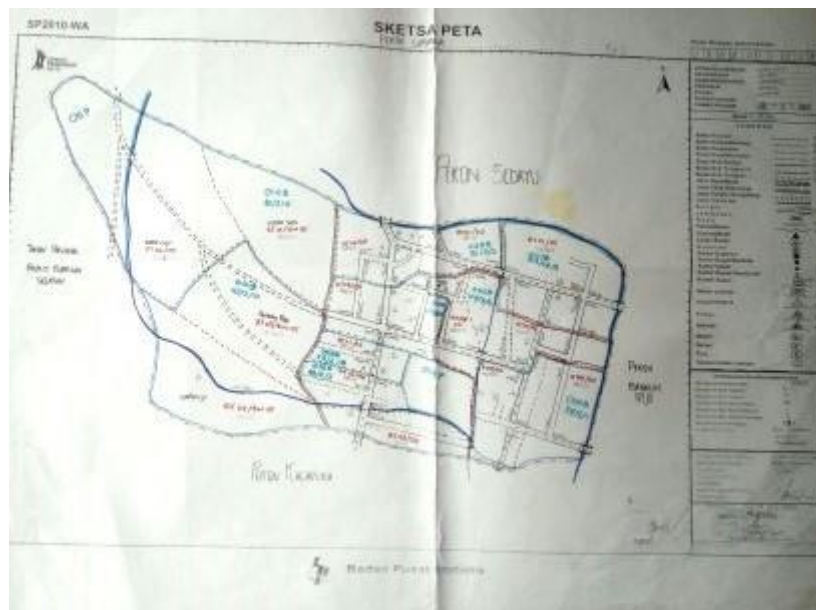
Pekon Sukaraja merupakan salah satu pekon yang berada di wilayah Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus. Pekon Sukaraja merupakan salah satu dari 22 Pekon di Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus. Pekon Sukaraja merupakan pekon dengan kondisi yang secara fisik dapat dikatakan tertata rapi dan masyarakat yang ingin semakin maju. Pekon

Sukaraja terletak di tengah-tengah pusat kota kecamatan. Pekon Sukaraja memiliki luas wilayah 6000 Ha, dengan ketinggian 60m dari permukaan laut.

Adapun batas-batas wilayah Pekon Sukaraja, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Pekon Sedayu
- b. Sebelah timur berbatasan dengan Pekon Bangun Rejo
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan Pekon Kacapura
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan

Berikut ini merupakan gambar peta Pekon Sukaraja, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus.



Sumber : Observasi peneliti di Pekon Sukaraja, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus

Gambar 4. Peta Pekon Sukaraja, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus.

Pekon Sukaraja beriklim tropis, sebagaimana di Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan. Hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Pekon Sukaraja, Kecamatan Semaka.

Pekon Sukaraja dikelilingi oleh perkebunan dan persawahan sehingga dimanfaatkan oleh masyarakat untuk bercocok tanam untuk memenuhi masyarakat sehari-hari.

4.1.3 Visi dan Misi Pekon Sukaraja

a. Visi

Visi/cita-cita adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan pekon. Penyusunan visi Pekon Sukaraja dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di Pekon Sukaraja seperti pemerintah pekon, BHP, tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga masyarakat pekon dan masyarakat pekon pada umumnya. Pertimbangan kondisi eksternal di pekon seperti satuan kerja wilayah pembangunan di kecamatan. Berdasarkan pertimbangan di atas visi Pekon Sukaraja adalah menjadikan Pekon Sukaraja bersih dan mandiri.

b. Misi

Selain penyusunan visi juga telah ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh pekon agar tercapainya visi pekon tersebut. Visi berada diatas misi. Pernyataan visi kemudian dijabarkan ke dalam misi agar dioperasionalkan atau dikerjakan. Sebagaimana penyusunan visi, misipun dalam penyusunannya menggunakan pendekatan partisipatif dan pertimbangan potensi dan kebutuhan Pekon Sukaraja sebagaimana proses yang dilakukan maka visi Pekon Sukaraja sebagai berikut:

1. Meningkatkan sarana dan prasarana.
2. Pengembangan simpan pinjam berbasis kelompok.
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

4. Meningkatkan pelayanan masyarakat.
5. Meningkatkan pelayanan masyarakat dibidang kesehatan.
6. Menumbuhkan rasa gotong royong masyarakat.

4.1.4 Kondisi Demografi Pekon Sukaraja

a. Jumlah penduduk

Jumlah penduduk merupakan salah satu faktor utama yang menentukan kualitas perkembangan di dalam suatu masyarakat dan dapat dijadikan ukuran atas keberhasilan pembangunan dalam perkembangan penduduk di dalam suatu daerah. Berikut merupakan jumlah penduduk Pekon Sukaraja.

Tabel 5. Jumlah Penduduk

Dusun	Jumlah KK	Jumlah Penduduk		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
I	249	597	624	1221
II	195	586	577	1163
III	304	429	424	853
IV	158	248	232	516
V	62	110	94	204
	968	1970	1951	3957

Sumber: Laporan data penduduk bulan Januari 2020 Pekon Sukaraja, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus

b. Penduduk Berdasarkan Agama

Berdasarkan observasi peneliti, masyarakat Pekon Sukaraja sekitar 99,86% beragama Islam dan 0,14% beragama non-Islam yaitu Kristen. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai keislaman masih melekat dalam masyarakat Pekon Sukaraja. Prasarana Pekon Sukaraja terdiri dari 5 masjid dan 6 mushola.

c. Tingkat Kesehatan

Kesehatan berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kesehatan merupakan salah satu indikator kesejahteraan yang dapat menggambarkan derajat kesehatan masyarakat dalam kaitannya dengan kualitas hidup. Pembangunan bidang kesehatan bertujuan agar seluruh lapisan masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan dengan mudah, murah dan merata. Prasarana kesehatan di Pekon Sukaraja terdiri dari posyandu, puskesmas dan rumah bersalin serta klinik rawat inap.

Tabel 6. Jumlah Prasarana Kesehatan

Prasarana Kesehatan	Jumlah
Puskesmas	1
Posyandu	3
Rumah Bersalin	1
Klinik Rawat Inap	1

Sumber : Observasi peneliti kepada perangkat desa (juru tulis Pekon Sukaraja)

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa prasarana kesehatan di Pekon Sukaraja terbanyak yaitu posyandu dan paling sedikit yaitu puskesmas, rumah bersalin dan klinik rawat inap. Hal ini menunjukkan kesadaran masyarakat tentang kesehatan yang tinggi karena banyaknya infrastruktur kesehatan di Pekon Sukaraja

d. Tingkat Pengeluaran atau Konsumsi

Pola pengeluaran rumah tangga yang dilihat berdasarkan pengeluaran untuk makanan dan non pangan dapat menunjukkan tingkat ekonomi masyarakat di suatu daerah. Pengeluaran rumah tangga merupakan salah satu indikator yang dapat memberikan gambaran tentang kesejahteraan ekonomi penduduk. Berikut adalah tabel besaran pengeluaran atau pola konsumsi masyarakat.

Tabel 7. Pola Konsumsi Masyarakat Pekon Sukaraja

Pola Konsumsi	Jumlah Pengeluaran
Pengeluaran Pangan/Makanan	500.000-1.000.000
Pengeluaran Sandang/Pakaian	100.00-200.00
Pengeluaran Biaya Pendidikan	500.00-1.500.000
Pengeluaran Kesehatan	50.000-200.000
Pengeluaran lainlain (Listrik)	150.000-300.000

Sumber : Wawancara peneliti kepada perangkat desa (juru tulis Pekon Sukaraja)

Berdasarkan tabel 7 terlihat bahwa pola pengeluaran atau konsumsi terbesar adalah untuk pengeluaran pangan. Pengeluaran untuk makanan lebih besar dari pola konsumsi lainnya yaitu sandang, biaya pendidikan, kesehatan dan listrik. Sehingga dapat dikatakan bahwa pengeluaran konsumsi terbesar yang dikeluarkan dari pendapatan adalah untuk konsumsi pangan. Sisa pendapatan untuk konsumsi lainnya, seperti biaya listrik, biaya pendidikan dan biaya lainnya.

e. **Tingkat Pendidikan**

Indikator pendidikan dapat digunakan sebagai ukuran untuk menggambarkan taraf hidup penduduk di suatu daerah. Pendidikan diharapkan mampu meningkatkan produktivitas penduduk dan pendidikan merupakan salah satu aspek penting kehidupan masyarakat yang berperan dalam peningkatan kualitas hidup. Berdasarkan hasil observasi, peneliti menunjukkan bahwa rata-rata masyarakat Pekon Sukaraja berpendidikan hingga jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA). Berdasarkan hasil penelitian dapat dikatakan bahwa masyarakat Pekon Sukaraja telah melaksanakan program wajib belajar 12 tahun yang direkomendasikan oleh pemerintah. Fasilitas pendidikan di Pekon Sukaraja meliputi 3 Taman Kanak-Kanak (TK), 4 Sekolah Dasar (SD) dan 1 Sekolah Menengah Pertama (SMP).

f. Kondisi Ekonomi

Sebagian besar mata pencaharian di Pekon Sukaraja adalah petani dan pengusaha. Mereka mengelola pertanian yang masih mendominasi wilayah mereka. Berdasarkan observasi peneliti, sekitar 85,09% masyarakat Pekon Sukaraja merupakan bagian dari petani yang menggantungkan pendapatannya dari hasil pertanian untuk memenuhi kebutuhan keluarga, hal ini sesuai dengan topografi Pekon Sukaraja yang memiliki potensi sumber ekonomi di bidang pertanian, terutama tanaman pangan (padi), kelapa, kakao dan sebagainya. Peluang usaha ekonomi di bidang pertanian ini akan menciptakan pendapatan bagi masyarakat, oleh karena itu pentingnya sumber daya manusia yang berperan aktif dan berpengetahuan untuk mengembangkan dan mengelola sumber daya alam di Pekon Sukaraja sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat sekitar.

4.2 Kepala Desa

4.2.1 Tugas Kepala Desa

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pasal 26 ayat (1) kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

4.2.2 Wewenang Kepala Desa

Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 26 ayat (2), wewenang kepala desa antara lain:

- a. Memimpin pelaksanaan pemerintahan desa.
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa.
- c. Menguasai pengelolaan kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa.

- d. Menetapkan peraturan desa.
- e. Menentukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD).
- f. Membina kehidupan masyarakat desa.
- g. Membina ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat desa.
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya untuk mencapai perekonomian yang berskala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa.
- i. Mengembangkan sumber pendapatan desa.
- j. Mengusulkan dan menerima pengalihan sebagian kekayaan Negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan.
- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna.
- m. Mengkoordinasikan pembangunan desa partisipatif.
- n. Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.2.3 Hak Kepala Desa

Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pasal 26 ayat (3), kepala desa berhak:

- a. Mengusulkan susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa.
- b. Mengusulkan rancangan dan menetapkan peraturan desa.
- c. Menerima penghasilan rutin bulanan, tunjangan, dan kuitansi lain yang legal dan dapat menjamin kesehatan.
- d. Mendapatkan perlindungan hukum untuk kebijakan yang diterapkan.
- e. Memberikan amanah atas pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat desa.

4.2.4 Kewajiban Kepala Desa

Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pasal 26 ayat (4), kepala desa berkewajiban:

- a. Menjunjung tinggi dan mengamalkan Pancasila dalam melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika.
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
- c. Menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat desa.
- d. Mematuhi dan menegakkan hukum dan peraturan.
- e. Menjalankan kehidupan demokrasi dan keadilan gender.
- f. Menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih dan bebas dari kolusi, kolusi dan nepotisme.
- g. Menjalin kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa.
- h. Melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik.
- i. Mengelola keuangan dan aset desa.
- j. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa.
- k. Menyelesaikan perjuangan masyarakat di desa.
- l. Mengembangkan ekonomi masyarakat pedesaan.
- m. Membina dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya masyarakat desa.
- n. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa.
- o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan.
- p. Memberikan informasi kepada masyarakat desa.

4.3 Badan Permusyawaratan Desa

4.3.1 Tugas Badan Permusyawaratan Desa

Berdasarkan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa pasal 32 bagian kedua Badan Permusyawaratan Desa mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Menggali aspirasi masyarakat.
2. Menampung aspirasi masyarakat.
3. Mengelola aspirasi masyarakat.
4. Menyalurkan aspirasi masyarakat.
5. Menyelenggarakan musyawarah BPD.
6. Menyelenggarakan musyawarah desa.
7. Membentuk panitia pemilihan kepala desa.
8. Menyelenggarakan musyawarah desa khusus untuk pemilihan kepala desa antar waktu.
9. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa.
10. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja kepala desa.
11. Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa.
12. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan pemerintah desa.
13. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan pemerintah desa dan lembaga desa lainnya.
14. Melaksanakan tugas lain yang diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.3.2 Fungsi Badan Permusyawaratan Desa

Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pasal 55 bagian ketujuh Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi:

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa dengan Kepala Desa.

- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa.
- c. Mengawasi kinerja kepala desa.

4.3.3 Hak Badan Permusyawaratan Desa

Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pasal 61 Badan Permusyawaratan Desa berhak:

- a. Mengawasi dan meminta informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dari pemerintah desa
- b. Mengungkapkan pendapat tentang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pengembangan masyarakat desa dan pemberdayaan masyarakat desa
- c. Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

VI. SIMPULAN DAN SARAN

6.1 Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai komunikasi politik kepala desa dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam mencegah konflik sosial di Pekon Sukaraja, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Komunikasi politik kepala desa (2009-2016) dan kepala desa (2016-sekarang) menggunakan komunikasi interpersonal dan ketua Badan Permusyawaratan Desa (2009-sekarang) dalam mencegah konflik sosial di Pekon Sukaraja, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus juga menggunakan komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal kepala desa berupa model komunikasi interaksional dan model komunikasi transaksional. Sedangkan model komunikasi Badan Permusyawaratan Desa yaitu model komunikasi interaksional. Gaya komunikasi kepala desa (2009-2016) dan kepala desa (2016-sekarang) dalam mencegah konflik sosial di Pekon Sukaraja yaitu menggunakan gaya komunikasi *the equalitarian style* dan *the controlling style* sedangkan gaya komunikasi Badan Permusyawaratan Desa (2009-sekarang) yaitu *the equalitarian style*. Bentuk-bentuk komunikasi interpersonal kepala desa dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam mencegah konflik sosial di Pekon Sukaraja yaitu melalui percakapan, dialog dan *sharing*.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pencegahan konflik sosial di Pekon Sukaraja, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung dalam pencegahan konflik sosial di Pekon Sukaraja antara lain penguasaan bahasa berupa penggunaan bahasa

daerah dan bahasa Indonesia dalam berkomunikasi, sarana komunikasi yang digunakan berupa *handphone*, televisi, radio, papan pengumuman, surat, spanduk dan lingkungan yang baik. Faktor penghambat dalam pencegahan konflik sosial di Pekon Sukaraja antara lain hambatan psikologis berupa prasangka dan tidak percaya dan hambatan media berupa jaringan internet yang tidak stabil.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis tentang komunikasi politik kepala desa dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam mencegah konflik sosial di Pekon Sukaraja, Kabupaten Tanggamus maka terdapat beberapa saran sebagai berikut:

1. Untuk kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa diharapkan mempertahankan dan mengevaluasi model komunikasi yang sudah diterapkan untuk meningkatkan kepuasan masyarakat dan sebagai antisipasi terjadinya konflik baru. Serta Pemerintah Pekon Sukaraja harus lebih tanggap dalam upaya pengelolaan konflik yang belum terjadi ataupun yang sudah terjadi. Pemerintahan desa harus lebih memperhatikan peluang konflik yang ada di daerah. Pemerintah juga harus dapat memetakan daerah–daerah rawan konflik antar pekon yang ada di Kecamatan Semaka.
2. Untuk masyarakat Pekon Sukaraja diharapkan untuk saling menghargai, menyayangi, terbuka dan hendaknya selalu mengikuti kegiatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah desa karena untuk kebaikan bersama.
3. Memberdayakan kembali organisasi kemasyarakatan secara optimal seperti karang taruna dan sebagainya agar potensi pengembangan masyarakat khususnya para pemuda dapat berjalan terus menerus.

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, S. (2019). Analisa Masalah-Masalah Yang Muncul Dalam Pemekaran Wilayah Baru Pada Penyelenggaraan Otonomi Daerah. *Jiaganis (Jurnal Ilmu Administrasi Negara Dan Ilmu Administrasi Bisnis)*. <https://doi.org/10.31227/osf.io/p4eq3:1>.
- Alamsyah, F. 2020. Representasi, Ideologi dan Rekontruksi Media. *Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam*. Vol 3:92
- Alganih, I. (2016). Konflik Poso (Kajian Historis Tahun 1998-2001). Criksetra: *Jurnal Pendidikan Sejarah*. 162.
- Aminah, A. (2018). Strategi Komunikasi Politik (Kampanye) Yang Dilakukan Oleh Pasangan Calon Drs. H. T. Irfan Tb Dan Tgk. Yusri Jelang Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2017 Di Kabupaten Aceh Jaya. Source : *Jurnal Ilmu Komunikasi*. <https://doi.org/10.35308/source.v3i2.654:221>.
- Ananto. 2017. *Kebijakan Kepala Pekon Dalam Proses Integrasi Sosial Setelah Penyelesaian Konflik Antar Masyarakat (Studi Pekon Sukaraja)* (Skripsi). UIN Raden Intan Lampung. Bandar Lampung. 4-5, 54 p.
- Anisah, Z. 2018. Analisis Percakapan Dalam Acara “Talk Show Kick Andy Dengan Pengarang Novel Negeri Lima Menara. *E-Journal*. Vol 2:288
- Andika, A. 2015. Meningkatkan Knowledge Sharing Di Organisasi : Studi Literatur Terhadap Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Knowledge Sharing. *Jurnal Pasti*. Vol 9. 231
- Arumsari, N., Septina, E., Luthfi, M., & Rizki, N. (2017). Komunikasi Politik Kepala Desa dalam Mendorong Inovasi Pembangunan Desa: Studi Kasus Tiga Desa di Lereng Gunung Ungaran, Jawa Tengah. *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*. <https://doi.org/10.15294/jpi.v2i1.8488:91-97>.
- Awan, F. N., Badaruddin, & Miswar B.M. (2020). Faktor Penyebab Konflik Sosial Masyarakat Pesisir Penambangan Pasir Laut Di Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang. *Jurnal Niara*. <https://doi.org/10.31849/niara.v13i1.4294:1>.

- Badan Pusat Statistik. (2020). *Statistik Indonesia 2020*. In Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung. (2018). *Statistik Keamanan Provinsi Lampung 2018*. In Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung.
- Budianto., H. (2018). *Media Dan Komunikasi Politik*. Mbridge Press. 22 hlm.
- Ciciria, D. (2015). Siger Sebagai Wujud Seni Budaya Pada Masyarakat Multietnik di Provinsi Lampung. *Panggung*.
<https://doi.org/10.26742/panggung.v25i2.8:190-191>
- Creswell, J. W. (2016). (Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran). *Research Design*. In Terjemahan Bahasa Indonesia: 376
- Dinas Komunikasi dan Informasi. (2018). *Konflik sosial di Kabupaten Lampung Tengah*. <http://diskominfo.lampungengkab.go.id/>
- Dyawati, Y., Lidya, E., Ini, Y., & Pahrozi, R. (2018). Konflik Sosial Ekonomi Masyarakat Pesisir Di Desa Sungsang Kecamatan Banyuasin Ii Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan. *Jurnal Sosiologi Reflektif*.
<https://doi.org/10.14421/jsr.v12i2.1329:2>
- Fakhrudin, P. R. A. (2017). Pemenuhan Kebutuhan Belajar Anak Jalanan Di Kota Semarang Melalui Program Pendidikan Nonformal. *Jurnal Eksistensi Pendidikan Luar Sekolah (E-Plus)*. <https://doi.org/10.30870/e-plus.v2i1.2945:26>
- Hasanah, U. (2020). Manajemen Konflik Dalam Meningkatkan Kualitas Kerja Pada Lembaga Pendidikan Islam. *Al-Idarah : Jurnal Kependidikan Islam*: 4-5
- Hidayah. (2018). Penggunaan Instrumen Lembar Wawancara Pendukung Tes Diagnostik Pendeteksi Miskonsepsi Untuk Analisis Pemahaman Konsep Buffer-Hidrolisis.. *Jurnal Inovasi Pendidikan Kimia*: 77
- Ibrahim. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta. 101 hlm
- Informasi, D. K. dan. (2015). *Konflik sosial antara Desa Nabung, Kecamatan Sukadana dengan Desa Taman Asri, Kecamatan Purbolinggo, Lampung Timur*. <http://diskominfo.lampungtimurkab.go.id/>. diakses pada tanggal 5 Januari 2021 pukul 9.50.
- Informasi, D. K. dan. (2016). *Konflik sosial di Dusun Terang Agung, Kampung Gunung Terang, Kecamatan Gunung Terang, Kabupaten Tulang Bawang Barat*. <https://kominformo.tulangbawangbaratkab.go.id/>. diakses pada tanggal 5 Januari 2021 pukul 10.15.
- Informasi, D. K. dan. (2019). *Konflik sosial antara dua kelompok perbatasan Provinsi Sumatera Selatan dengan Provinsi Lampung lebih tepatnya di kawasan Register 45, Kabupaten Mesuji*.

<https://sipp.menpan.go.id/pelayanan-publik/wilayah/pemerintah-provinsi-lampung/pemerintah-kab-mesuji/dinas-komunikasi-dan-informatika>. diakses pada tanggal 5 Januari 2021 pukul. 11.00

- Irwandi. (2017). Analisis Konflik Antara Masyarakat, Pemerintah Dan Swasta (Studi Kasus di Dusun Sungai Samak, Desa Sungai Samak, Kecamatan Badau, Kabupaten Belitung). *Jispol*: 26.
- Kesuma, T. A. & Ciciria, D. (2018). Piil Pesenggiri : Strategi Resolusi Konflik Menggunakan Nilai-Nilai Agama Dan Pancasila. *Jurnal Masyarakat Dan Budaya*. <https://doi.org/10.14203/jmb.v19i2.394:239-250>.
- Lagu, M. 2016. Komunikasi Antar Budaya Di Kalangan Mahasiswa Etnik Papua Dan Etnik Manado Di Universitas Sam Ratulangi Manado. *E-Journal*. Vol 3 :2
- Lestari, T. F. 2017. *Pembelajaran Kemampuan Menulis Dialog Sederhana Melalui Metode Konseptual*. (Skripsi). Universitas Pasundan. Jawa Barat. 26 p.
- Mahmud. (2019). Bentuk Penyelesaian Konflik Sosial (Identifikasi Bentuk Penyelesaian Konflik Antara Public Relations Pt Donggi Senoro Liquefied Natural Gas Kabupaten Luwuk Banggai Dengan Masyarakat). *Jurnal Politico*:1.
- Misyuniarto KM. 2019. *Komunikasi Politik Kiai Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Studi Kasus Pada Pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Kabupaten Bangkaan)(Skripsi)*. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. 30-31 p.
- Maternity, F., (2018). Peranan Pemerintah Dalam Konflik Antaa Masyarakat Dengan Pt.Pp Lonsum Di Desa Tamatto Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba. *International Reviews of Immunology*:18-20.
- Maulana, I., & Nulhaqim, A. (2011). (Studi Kasus : Di Desa Eretan Wetan Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu Oleh : Soni A . Nulhaqim , Maulana Irfan , Wandi Adiansah. *Jurnal Universitas Padjajaran*: 16.
- Mekarisce, A. A. (2020). Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat*:147.
- Mellia, G. Hertano. Warganegara, A. Kurniawan, R,C. 2021. Managing Organizational Conflict in the 2019 Cuncurrent Elevtion In Palembang. *Jurnal Studi Sosial dan Politik*. Vol 5. No 1:137
- Mustamin. (2016). Studi Konflik Sosial Di Desa Bugis Dan Parangina Kecamatan Sape Kabupaten Bima Tahun 2014. *Jurnal Ilmiah Mandala Education*.185-186.

- Noermanzah. 2019. Bahasa Sebagai Alat Komunikasi, Citra Pikiran dan Kepribadian. *Article Matrics*. 308
- Nurudin. (2016). *Ilmu Komunikasi Ilmiah dan Popular*. PT Grafindo Persada. 219 hlm.
- Nurdianti, S. 2014. Analisis Faktor-Faktor Hambatan Komunikasi Dalam Sosialisasi Program Keluarga Berencana Pada Masyarakat Kebon Agung-Samarinda. *E-Journal Ilmu Komunikasi*. Vol 2. 149 hlm
- Paiman, P., Nawangsih, N., & ... (2019). Implementasi Strategi Pemasaran Pariwisata Untuk Meningkatkan Kepuasan Wisatawan Berkunjung Ke Desa Gucialit Kecamatan Gucialit Kabupaten Lumajang. *Jurnal penelitian*:503-504.
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang, pasal 2 ayat 1 dan 2 berisi pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pencegahan konflik.
- Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.
- Putri, N. W. (2018). Pergeseran Bahasa Daerah Lampung Pada Masyarakat Kota Bandar Lampung. Prasasti: *Journal of Linguistics*. <https://doi.org/10.20961/prasasti.v3i1.16550:79>.
- Pratiwi, R. ., & Syafiq, M. (2015). Studi Life History Identitas Dan Interaksi Sosial Pada Keturunan Tionghoa Muslim. *Jurnal Psikologi Teori Dan Terapan*. <https://doi.org/10.26740/jppt.v5n2:100>.
- Rahmana, Z. S. (2018). Resolusi Konflik Sosial Keagamaan Di Kota Bandung. Religious: *Jurnal Studi Agama-Agama Dan Lintas Budaya*. <https://doi.org/10.15575/rjsalb.v2i2.3105:162>.
- Rahmah, M.N (2016). Model Komunikasi Interpersonal dalam Kisah Nabi Yusuf As. Oleh: Mariyatul Norhidayati Rahmah Abstrak. Alhiwar *Jurnal Ilmu Dan Teknik Dakwah* Vol.04 No. 07: 2.
- Rijali, A. (2019). Analisis Data Kualitatif. Alhadharah: *Jurnal Ilmu Dakwah*. <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374:84-94>.
- Rochmat, U., Mulyana, N., & Irfan, M. (2015). Pekerja Sosial Dan Penyelesaian Konflik Di Indonesia. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*. <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i2.13278:190>.
- Rosaliza, M. (2015). Wawancara, Sebuah Interaksi Komunikasi Dalam Penelitian Kualitatif. *Jurnal Ilmu Budaya*. <https://doi.org/10.31849/jib.v11i2.1099:71>.
- Salim, N., Haruna, J., & Saraka. (2017). Analisis Pengaruh Manajemen Konflik

Terhadap Efektivitas Pengelolaan SD di Kab. Kutai Kartanegara (Studi Kausal Berdasarkan Persepsi Guru Pada Kec. Samboja, Muara Jawa dan Samboja). *Jurnal Pendas Mahakam*: 254

- Sangalang, R. 2020. Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Berita Hoaks Di Media Sosial Di Provinsi Kalimantan Tengah. *E-Journal*. Vol 6:37
- Saputri, M., Nasution, N., Darmawan, C. (2018). Pengaruh Komunikasi Interpersonal antara Orang Tua Akhlatul Karimah. *Jurnal Komunikasi Islam*. Vol 2 :63
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif dan R&B*. Alfabeta. 41, 308-345 hlm.
- Sukaryanto, S. (2016). Konflik Tanah Surat Ijo di Surabaya (Sebuah Perspektif Teoretik-Resolutif). BHUMI: *Jurnal Agraria Dan Pertanahan*. <https://doi.org/10.31292/jb.v2i2.68:171>.
- Sulaiman. 2013. Model komunikasi formal dan informal dalam proses kegiatan pemberdayaan masyarakat. *Jurnal penelitian komunikasi*. Vol 16. No 2:117
- Suratman, Y. P. (2017). The Internal Conflict Taxonomy In Indonesia That Leads To Proxy War. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*. <https://doi.org/10.33172/jpbh.v7i1.169:45>.
- Suryawati, D. I. dan I. (2016). Konflik Penduduk Asli Dengan Warga Pendetang Di Pondok Aren, Tangerang Selatan. *Jurnal Komunikasi*: 47.
- Surayya, R. (2018). Pendekatan Kualitatif Dalam Penelitian Kesehatan. *Averrous: Jurnal Kedokteran Dan Kesehatan Malikussaleh*. <https://doi.org/10.29103/averrous.v1i2.415:77>.
- Suryanto. (2015). *Pengantar Ilmu Komunikasi*. CV Pustaka Setia. 320-321 hlm.
- Tajuddin, S., Sani, M & Yeyeng, T (2016). Berbagai Kasus Konflik di Indonesia: Dari Isu Non Pribumi, Isu Agama, Hingga Isu Kesukuan. Sulesana. *Jurnal Konflik*: 63.
- Tawakkal, G., Suhardono, W., Garner, A. & Seitz, T. (2017). Consistency and vote buying: Income, education, and attitudes about vote buying in Indonesia. *Journal of East Asian Studies*. <https://doi.org/10.1017/jea.2017.15:3>.
- Tulus, R. (2016). Konflik Cina-Jawa di Kota Pekalongan Tahun 1995. *Journal of Indonesian History* :36.
- Trisno, A. (2019). Potensi Konflik Sosial Masyarakat Nagari Padang Sibusuk dengan Desa Kampung Baru Pasca Resolusi Konflik. Jupiis: *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*. <https://doi.org/>

10.24114/jupiis.v1i1i2.14146:288.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Yusanto, Y. (2020). Ragam Pendekatan Penelitian Kualitatif. *Journal Of Scientific Communication (JSC)*. <https://doi.org/10.31506/jsc.v1i1.7764:2>.

Wahyudi, A. (2015). Konflik, Konsep Teori Dan Permasalahan. *Jurnal Publiciana*: 2-3.

Widyoko, E. P. (2015). Teknik *Penyusunan nstrumen Penelitian*,. Pustaka Pelajar. 50 hlm.

Wallujan, F. 2017. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Desa Kembes Satu Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa. *Jurnal Pemerintahan*: 1

Zainul., Wibisono, Yusuf. (2019). Konflik Politik Antara Gubernur Dan DPRD DKI Jakarta Dalam Proses Penetapan APBD 2015. *Jurnal Sosial dan Humainora*:266-268